Analisis Kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan Pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in

"Comfort Women Policy Analysis in South Korea During Moon Jae-In's Leadership"

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih Gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan Spesialisasi Hubungan Internasional

SKRIPSI

Disusun Oleh:

JENNY LAURENS

NIM. 146420121014

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* DI KOREA SELATAN PADA MASA KEPEMIMPINAN MOON JAE-IN

Nama : Jenny Laurens

NIM : 146420121014

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada 09 Juli 2025

Pembimbing I

Nurinaya, M.H.I. (.....)
NIDN. 1417129501

Pembimbing II

Try Danuwijaya, M.H.I. (.....)
NIDN. 1407129201

i

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* DI KOREA SELATAN PADA MASA KEPEMIMPINAN MOON JAE-IN

Nama : Jenny Laurens

NIM : 146420121014

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada 09 Juli 2025

Dekan FHISIPOL

Asfarina Gindis Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420088201

Tim Penguji Skripsi

1) Etik Siswati Ningrum, M.H.I.

NIDN. 1409018401 (.....)

2) Try Danuwijaya, M.H.I.

NIDN. 1407129201 (.....)

3) Nurinaya, M.H.I.

NIDN. 1417129501 (.....)

ii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jenny Laurens

NIM : 146420121014

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan mencantumkan sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tesebut.

Sorong, 08 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Jenny Laurens

NIM. 146420121014

iii

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in (2017-2022) terhadap isu *Comfort Women,* dengan fokus pada pemenuhan hak-hak korban yang mencakup keadilan, kompensasi, dan pengakuan. Masalah *Comfort Women* merupakan simbol pelanggaran hak asasi manusia pada masa kolonial Jepang yang hingga kini menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Korea Selatan-Jepang.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi akademik, dan laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teori Feminisme Postkolonial dan konsep *Gender Mainstreaming* untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan mengintegrasikan perspektif korban dan keadilan gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Moon Jae-in, seperti pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation*, penetapan hari peringatan nasional, dan pengarusutamaan isu *Comfor Women* dalam pendidikan, lebih responsif terhadap hak dan tuntutan korban dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak korban dan hubungan diplomatik dengan Jepang.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi kebijakan luar negeri berbasis HAM dan gender, serta menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menangani isu sejarah secara inklusif dan berbasis korban.

Kata Kunci: *Comfort Women*, Kebijakan Luar Negeri, Hak Asasi Manusia, Moon Jae-in, Hubungan Korea Selatan-Jepang.

ABSTRACT

This study aims to analyze South Korea's policies on the Comfort Women issue during Moon Jae-in's administration (2017–2022), focusing on victims' rights fulfillment in terms of justice, compensation, and recognition. The Comfort Women issue, a symbol of grave human rights violations under Japanese colonial rule, remains a source of tension in South Korea–Japan relations.

The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using secondary data, including policy documents, civil society reports, academic publications, and international organization reports. The analysis is grounded in Postcolonial Feminism and Gender Mainstreaming to evaluate how policies integrate victims' perspectives and gender justice.

The findings indicate that Moon Jae-in's policies — such as the dissolution of the Reconciliation and Healing Foundation, designation of a national memorial day, and integration of the issue into education — were more responsive to victims' rights compared to previous administrations. Nonetheless, these policies faced challenges in balancing victims' rights with diplomatic relations with Japan.

This study contributes to the development of human rights-based foreign policy analysis and offers recommendations for policymakers in addressing historical issues inclusively and victim-centered.

Keywords: Comfort Women, Foreign Policy, Human Rights, Moon Jae-in, South Korea-Japan Relations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, naskah ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nurinaya, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

2. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama masa studi.

3. Orang tua tercinta, atas doa, cinta, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah penulis.

4. Teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional 2021, atas semangat, kebersamaan, dan motivasi yang selalu menguatkan.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian hubungan internasional dan isu-isu gender serta hak asasi manusia dalam konteks kebijakan luar negeri.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Kegagalan bukanlah akhir, tapi permulaan”

(Twenty- Five Twenty-One)

“*Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny*”

(C.S. Lewis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang tak ternilai. Atas izin-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan hati, serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan dalam hidup.

Dengan segenap ketulusan dan rasa bahagia yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sumber segala kekuatan dan pengetahuan, atas nikmat iman, kesempatan, dan kemudahan yang tak terhingga selama proses penulisan ini berlangsung.

2. Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran dan keteladanan yang abadi dalam setiap langkah hidup umatnya.

3. Kedua orang tua tercinta, atas cinta, doa, dukungan moral dan material yang tidak pernah putus:

- Ayahanda Ridwan Ali Umagap, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.

- Ibunda Rismawati, yang meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, telah menjadi panutan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh cinta seorang diri selama satu dasawarsa, menjadi cahaya dalam setiap langkah, dan terus berjuang demi kehidupan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang untuk ibu tercinta.

4. Adik-adikku tersayang, Jefry Laurens dan Khanza Assyfa Ali Umagap. Terima kasih atas doa, motivasi, semangat, dan canda tawa yang menjadi pelengkap perjuangan ini. Tumbuhlah menjadi versi terbaik dari diri kalian.

5. Nenek tercinta, Almh. Hadijah Genda, cinta abadiku yang paling kurindukan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang pernah diberikan semasa hidup. Meskipun kini tidak lagi bersamaku, semangat dan nasihat beliau menjadi alasan kuat dalam perjuangangku meraih apa yang menjadi tujuan, salah satunya gelar sarjana. Semoga nenek bahagia di sisi-Nya dan bangga atas pencapaian ini. Aamiin.

6. Keluarga besar, yang senantiasa hadir dalam doa dan memberi semangat yang tidak ternilai.

7. Dosen pembimbing dan para dosen Program Studi Hubungan Internasional, atas segala ilmu, bimbingan, serta ketelitiannya selama proses akademik penulis.

8. Sahabat dan teman seperjuangan Pondok HI 21, Diana Warmasen, Dita Nurul Fitriah Ningsih, Desy Natalia Dorkas Fawan, Fransiskus Xaverius Stanislau Runaki, Gita Bhayangkari Manglili, Laili Mufidatul Almas, Putri Fajar Faizah, Ross Mochammad Alifano, Sitty Maisyaro Kalauw, Syafira Maharani Suara, dan Syahri Safri Seknun. Terima kasih atas semangat, kebersamaan, dan tawa yang mewarnai perjalanan ini. *See you on top, guys!*

9. Teman-teman tersayangku sejak kecil, Ayu, Fina, Nabila, Rahma, Rara, Syahny. Terima kasih atas dukungan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan, waktu, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

11. Diriku sendiri Jenny Laurens, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari, meskipun jalan seringkali gelap dan penuh keraguan. Terima kasih telah meyakini bahwa setiap proses memiliki maknanya sendiri, meskipun hasilnya tak selalu sejalan dengan harapan. Terima kasih pula karena tetap menghadapi rasa takut dengan kejujuran, tanpa membiarkannya menjadi penghalang untuk terus melangkah maju. Dan yang paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih untuk bertahan, belajar, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Pembatasan Masalah 8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1.4.1 Tujuan Penelitian 9
1.4.2 Manfaat Penelitian 10
1.5 Studi Pustaka 10
1.6 Kerangka Dasar Pemikiran 14
1.6.1 Feminisme Postkolonial (Gayatri Chakravorty Spivak) 14
1.6.2 *Gender Mainstreaming* (Caroline Moser) 18
1.7 Metode Penelitian 20
1.7.1 Unit Analisa 21
1.7.2 Sumber Data Penelitian 22
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 22
1.8 Argumen Dasar 23
1.9 Sistematika Penulisan 24
BAB II **26**
DINAMIKA *COMFORT WOMEN* DI KOREA SELATAN **26**

2.1 Sejarah *Comfort Women* 27
2.1.1 Pembentukan Sistem *Comfort Stations* 29
2.1.2 Pengalaman dan Dampak yang Dialami Korban *Comfort Women* 36
2.2 Keberadaan Korban *Comfort Women* Era Park Geun-Hye 38
2.2.1 Isu *Comfort Women* Pasca Perang 38
2.2.2 *Comfort Women* Era Park Geun-Hye 40
2.3 Keberadaan Korban *Comfort Women* Era Moon Jae-In 45
BAB III 50
KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* PADA MASA KEPEMIMPINAN MOON JAE-IN 50
3.1 Adanya Peninjauan Ulang Kebijakan *Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015* 51
3.2 Pemenuhan Hak-hak Korban *Comfort Women* 55
BAB IV 62
RESPON ATAS KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* PADA ERA MOON JAE-IN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN 62
4.1 Respon Jepang Terhadap Audiensi yang Dilakukan Korea Selatan 62
4.2 Implementasi Kebijakan *Comfort Women* Oleh Korea Selatan 70
BAB V 79
PENUTUP 79
5.1 Kesimpulan 79
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Penyebaran *Comfort Stations* 30
Gambar 2. 2 Regulasi Penggunaan *Comfort Stations* 31
Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi dalam Sistem *Comfort Women* 32
Gambar 2. 4 Perekrutan dan Pengangkutan Korban *Comfort Women*..... 35
Gambar 2. 5 Ilustrasi Tentara Jepang Menunggu Giliran di *Comfort Stations*..... 36
Gambar 2. 6 Meja Pemeriksaan *Veneral Diseases* 37
Gambar 2. 7 Kesaksian Kim Hak-Sun, 14 Agustus 1991 39
Gambar 3. 1 Grafik Peningkatan Bantuan Finansial Korban *Comfort Women* 57
Gambar 3. 2 Kunjungan Resmi *Ministry of Gender Equality and Family* 57
Gambar 3. 3 Cuplikan Kampanye #JusticeforComfortWomen 60
Gambar 4. 1 Dokumentasi Aksi Boikot Konsumen di Korea Selatan 64
Gambar 4. 2 Grafik Kondisi Kesehatan Penyintas *Comfort Women* tahun 2022 . 73
Gambar 4. 3 Grafik Penurunan Jumlah Penyintas vs Timeline Kebijakan Moon Jae-in 77
Gambar 4. 4 Grafik Efektivitas Kebijakan Moon Jae-in..... 77
Gambar 4. 5 Grafik Evaluasi Keseluruhan Efektivitas Kebijakan Moon Jae-in Terkait Pemenuhan Hak Korban *Comfort Women* di Korea Selatan..... 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian 11
Tabel 2. 1 Awal Mula Kependudukan Jepang di Korea 28
Tabel 2. 2 Jumlah Penyintas yang Masih Hidup (2015-2022)..... 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama penjajahan Jepang, sekitar 70-80% wanita Korea Selatan dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang.[1] Para wanita ini ditipu, diculik, dan dipaksa untuk memberikan layanan seksual melalui jaringan atau tempat yang dinamakan "*Comfort Stations*". Penderitaan serupa juga dialami oleh kaum perempuan dari wilayah pendudukan Jepang lainnya termasuk Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.[2] Para korban ini kemudian dikenal dengan sebutan "*Comfort Women*" atau dalam bahasa Jepang disebut "*Jugun Ianfu*".

Kehidupan di tempat-tempat tersebut penuh dengan kekerasan dan pemaksaan yang tak berperikemanusiaan, dimana para wanita dipaksa melayani hingga 40 pria per hari.[3] Sistem ini digunakan oleh militer Jepang dengan dalih mengurangi risiko penyakit menular seksual dan menjaga moral tentara yang bertujuan untuk mencegah pemerkosaan massal yang dapat memperburuk penilaian masyarakat di wilayah pendudukan. Selama berlangsungnya Perang Dunia II (1939-1945), sekitar 290 *Comfort Stations* tersebar di berbagai wilayah pendudukan Jepang.[4] Jumlah kelembagaan sistem tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 1.200 militer Jepang mengelola dan mengawasi "*Comfort Stations*" yang digunakan untuk menahan para wanita.[5] Meskipun ada keterlibatan militer

---

[1] Yoshiaki Yoshimi, *Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military during World War II*, Asia Perspectives (New York: Columbia university press, 1995), 91–93.

[2] Yuting Xie dan Emily Kraeck, "An Unforgettable Ordeal: Chinese '*Comfort Women*' in World War II," *Journal of Student Research* 10, no. 3 (28 Oktober 2021): 2–3, https://doi.org/10.47611/jsrhs.v10i3.1798.

[3] Radhika Coomaraswamy, "Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences, Radhika Coomaraswamy, in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1994/45." (United Nations Economic and Social Council, 1996), 13.

[4] Toshiyuki Tanaka, *Japan's Comfort Women: sexual slavery and prostitution during World War II and the US occupation*, Asia's transformations (London ; New York: Routledge, 2002), 84–87.

[5] Chunghee Sarah Soh, *The Comfort Women: sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan*, Worlds of desire (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 153–57.

yang signifikan dan operasi yang luas, isu *Comfort Women* ini sebagian besar tidak dibahas dan disimpan dalam diam selama beberapa dekade setelah perang berakhir (1945-1990). Namun, sejarah isu ini menjadi lebih dikenal setelah pernyataan Kim Hak Sun, seorang mantan korban Korea, melalui media pada tahun 1991.[6] Kasus "*Comfort Women*" kemudian menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia selama perang serta sebagai topik perdebatan politik yang sensitif di kawasan Asia Timur, di mana militer Jepang secara sistematis melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan dari negara jajahannya.

Akibat kondisi hidup yang buruk dan kekerasan seksual yang dialami di bordil militer, para wanita ini tidak hanya mengalami kesulitan fisik, tetapi juga berbagai gangguan kejiwaan mulai dari depresi hingga PTSD yang kompleks atau trauma pasca perang.[7] Beban psikologis yang diderita begitu parah sehingga mempengaruhi kehidupan para korban secara keseluruhan, misalnya sering merasa tersisih dan terstigmatisasi di tengah masyarakat. Sehingga, mereka takut menceritakan pengalaman terkait isu karena malu dan takut ditolak. Kemudian, dikarenakan kurangnya pengakuan dan kompensasi yang layak atas apa yang dialami, penderitaan para korban atas ketidakadilan semakin meningkat.

Pada tahun 1992, pemerintah Jepang pertama kali mengakui adanya sistem *Comfort Women* walau masih disertai penolakan terhadap tuduhan bahwa ada pemaksaan dalam proses perekrutan.[8] Perubahan sikap terjadi pada Agustus 1993, ketika tekanan dari Korea Selatan dan masyarakat global membuat Sekretaris Kabinet Yohei Kono mengakui bahwa sistem itu memiliki unsur paksaan.[9] Dalam

---

[6] Theodore Hughes, "*Crisis of Gender and the Nation in Korean Literature and Cinema: Modernity Arrives Again* (Review)," *Journal of Korean Studies*, Breaking the Silence: Kim Hak-sun's Testimony and the Beginning of the *Comfort Women* Movement, 17, no. 2 (2012): 338–60, https://doi.org/10.1353/jks.2012.0019.

[7] Trinovianto George Reinhard Hallatu, "DAMPAK PSIKO-SOSIAL PADA MANTAN *JUGUN IANFU*" 4, no. 1 (2015): 32.

[8] Ine Kusuma Aryani, "*Comfort Women* Korea Selatan, Karakter yang Terlupakan," 1, no.2 (2022): 106.

[9] Maria Aurelia Primastuti Puspasari dan Hermini Susiatiningsih, "Jalan Terjal Implementasi *Reconciliation and Healing Foundation* oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17, no. 1 (2021): 101–103.

upaya konkret, *Asian Women's Fund* kemudian didirikan pada tahun 1995,[10] sebuah yayasan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan kompensasi kepada para penyintas. Namun, para korban yang menginginkan pengakuan resmi lebih mendalam, menganggap inisiatif ini tidak memenuhi harapan.

Setelah adanya pernyataan Kim Hak Sun, Jepang menanggapi dengan menyatakan penyesalan mendalam terkait masalah "*Comfort Women*" selama perang.[11] Namun, pernyataan ini dinilai belum memadai karena Jepang tidak mengakui secara eksplisit tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi. Kompleksitas diperparah oleh sikap awal pemerintah Jepang yang menolak permintaan maaf dengan mengatakan bahwa Perjanjian Damai San Francisco (1951)[12] dan Perjanjian Damai Korea Selatan-Jepang pada 1965[13] telah menyelesaikan semua masalah perang termasuk *Comfort Women*. Fakta bahwa Jepang memilih pendekatan penyelesaian formal serta Korea Selatan yang menekankan pentingnya pengakuan moral, menunjukkan bagaimana isu sejarah dapat sangat memengaruhi dinamika hubungan diplomatik hingga hari ini, terutama ketika berkaitan dengan identitas nasional dan hak asasi manusia.

Isu *Comfort Women* kembali muncul pada tahun 2015, yang kemudian memicu perdebatan panjang di Korea Selatan dan Jepang. Presiden Korea Selatan pada saat itu, Park Geun Hye, mengambil langkah berani untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Walaupun semenjak pelantikannya di tahun 2013, Park telah menjauhkan diri dari Jepang dengan mengatakan bahwa pertemuan antara kedua negara akan sia-sia jika tidak ada permohonan maaf formal untuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah

[10] Galuh Kinnari Lalitya "Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu Comfort," *Journal of international Relations 6,* no.4 (2020): 641.

[11] *Ibid.*

[12] Treaty of Peace with Japan, *San Francisco Peace Treaty* (1951), Article 14, accessed December 25, 2024, https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20136/volume-136-i-1832-english.pdf.

[13] *Agreement* on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims and on Economic Cooperation Between Japan and the Republic of Korea (1965), Article II, accessed December 25, 2024, https://treaties.un.org/doc/Publication/unts/Volume%20583/volume-583-I-8473-English.pdf.

kolonial Jepang.[14] Setelah berbagai upaya negosiasi yang sulit, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan yang diharapkan dapat menyelesaikan kesulitan para korban selama masa perang. Upaya penyelesaian masalah ini dilakukan melalui kesepakatan bilateral di bawah pemerintahan Presiden Park Geun-hye dengan Jepang pada tahun 2015, yang dinyatakan sebagai penyelesaian "*Final and Irreversible*" (*Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015*). Berdasarkan hasil kesepakatan, pemerintah Jepang memberikan dana sebesar 1 miliar yen[15] melalui sebuah yayasan khusus *(Reconciliation and Healing Foundation)* yang didirikan oleh Korea Selatan pada Juli 2016 untuk para korban "*Comfort Women*". Dengan adanya yayasan ini, diharapkan para korban akan menerima pengakuan, rehabilitasi, dan kompensasi yang layak akan trauma yang dialami. Pengeluaran dana tersebut tidak hanya merupakan bentuk kompensasi tetapi juga menunjukkan komitmen Jepang untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Korea Selatan dan memperbaiki citra negara di mata masyarakat internasional. Selain memberikan dana, Jepang juga menyampaikan permintaan maaf resmi dan meminta Korea Selatan menghapus "*Statue of Peace* atau Tugu Perdamaian" di depan kedutaan Jepang di Seoul.[16] Meski dianggap sebagai langkah diplomatik yang signifikan, kesepakatan tersebut dikritik keras oleh para korban dan kelompok pendukungnya karena tidak merepresentasikan dan menghadirkan keterlibatan para korban dalam perumusan. Ketidakpuasan muncul terutama karena proses negosiasi yang kurang inklusif dan fokus hanya pada penyelesaian finansial dibanding pengakuan moral. Skeptisisme dan ketegangan pun masih ada di masyarakat Korea Selatan meskipun perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki hubungan bilateral. Akhirnya, masalah ini berdampak pada reputasi Jepang baik di tingkat bilateral maupun internasional, dimana banyak lembaga internasional termasuk PBB menyerukan kompensasi dan permintaan maaf yang lebih substantif.

---

[14] Ankit Panda, "Park Geun-hye: Japan Summit 'Pointless' Without Apology," *The Diplomat*, 5 November 2013.

[15] Sigit dan Farin Almira Anantasya, "*Comfort Women*: Impacts on Japan's Relations with South Korea and The Philippines," *Malaysian Journal of International Relations* 9, no. 1 (30 Desember 2021): 152.

[16] Galuh Kinnari Lalitya, *Op.Cit.,* h.640.

Kebijakan pemerintah mengenai masalah "*Comfort Women*" sangat dipengaruhi oleh konteks politik domestik Korea Selatan. Tekanan dari kelompok aktivis dan masyarakat sipil adalah faktor utama yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Jepang. Presiden Moon Jae-in menanggapi tekanan domestik dengan memberlakukan tindakan yang lebih proaktif. Dalam hal ini, ia menempatkan korban *Comfort Women* sebagai fokus penyelesaian masalah untuk memperjuangkan hak-hak korban, dengan menanggapi kesepakatan 2015 antara pemerintahan Park Geun-hye dan Jepang. Sehingga pada Mei 2017 setelah menjabat sebagai Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in membentuk satuan tugas khusus (*Task Force for the Review of the Korea-Japan Comfort Women Agreement*) untuk meninjau kembali perjanjian 2015 tersebut.[17] Selain itu, Moon juga aktif mendorong kesadaran internasional mengenai isu melalui forum global seperti PBB, dengan menegaskan bahwa masalah *Comfort Women* adalah pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian global. Pemerintahannya mengikuti sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB, mendukung resolusi yang melindungi korban kekerasan seksual, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat internasional melalui pameran, buku, dan pendirian patung Perdamaian. Moon Jae-in juga menekankan pentingnya penyelesaian yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, meminta Jepang bertanggung jawab sepenuhnya, dan menjadikan masalah ini sebagai pelajaran global untuk mencegah kekerasan berbasis gender di masa depan. Metode tersebut menunjukkan upaya Moon Jae-in untuk menyeimbangkan kebutuhan diplomasi dengan prinsip HAM.

Insiatif legislatif pertama yang signifikan untuk para korban *Comfort Women* dimulai dengan pengesahan undang-undang pengakuan dan kompensasi oleh Parlemen Korea Selatan pada tahun 2007 atau dikenal dengan **"Undang-Undang Khusus untuk Penelitian Kebenaran tentang Masalah Wanita Penghibur Militer Jepang"** (*Special Act on Fact-Finding Concerning the Issue of Japanese Military Sexual Slavery*). Upaya ini kemudian diperkuat dengan berbagai usulan legislasi dari sejumlah organisasi non-pemerintah, seperti *Korean*

[17] Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. "*Task Force* on the Review of the Korea-Japan *Agreement* on the Issue of '*Comfort Women*' Victims Launches". Press release. 2017.

Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery atau (*Jeongdaehyeop* dalam bahasa Korea)[18] yang memimpin advokasi tuntutan keadilan. Namun, ketegangan diplomatik dengan Jepang menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Situasi politik domestik yang tidak stabil dan minimnya dukungan pemerintah pun semakin mempersulit upaya legislasi ini. Sehingga, berbagai hambatan tersebut mengakibatkan kegagalan upaya-upaya legislasi sebelum masa pemerintahan Moon Jae-in dalam memenuhi harapan para korban *Comfort Women*.

Momentum internasional dalam isu *Comfort Women* dimulai ketika Komisi HAM PBB melalui laporan Radhika Coomaraswamy pada tahun 1996, secara resmi mengategorikan praktik tersebut sebagai kejahatan perang yang melibatkan militer Jepang.[19] Empat tahun kemudian, melalui pengadilan simbolis yang diselenggarakan *Women's International War Crimes Tribunal* memberikan platform bagi para korban untuk bersaksi tentang pelanggaran yang dialami. Upaya advokasi global ini kemudian didukung oleh organisasi HAM internasional seperti *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*. Sinergi berbagai upaya internasional ini akhirnya menghasilkan desakan global yang kuat terhadap pemerintah Jepang untuk mengambil tanggung jawab historis mereka.

Upaya penyelesaian kasus *Comfort Women* pada masa kepemimpinan Moon Jae-in menunjukkan keseriusan melalui beberapa kebijakan, seperti penolakan terhadap perjanjian *Comfort Women* tahun 2015 di masa pemerintahan Park Geun-hye. Selanjutnya, pada Desember 2017 (dibawah kepemimpinan Moon Jae-in), Korea Selatan menetapkan 14 Agustus sebagai Hari Peringatan Korban "*Comfort Women*" atau *Japanese Military Comfort Women Victims Memorial Day*,[20] untuk mengenang kesaksian pertama Kim Hak Sun pada Agustus 1991 sehingga mampu meningkatkan kesadaran publik tentang penderitaan para korban dan pentingnya mengingat sejarah tersebut. Selain itu, Presiden Moon Jae-in menghapus kebijakan *Reconciliation and Healing Foundation* yang tidak dapat mewujudkan visi misi terkait pengembalian hak dan martabat korban *Comfort*

[18] Yoo Cheong-mo, "Civic group vows to take '*Comfort Women*' lawsuit to appellate court," *Yonhap News Agency*, 23 April 2021.
[19] Zhiliang Su, "Reconstructing the History of the '*Comfort Women*' System: The Fruits of 28 Years of Investigation into the '*Comfort Women*' Issue in China," No.7 (1 Maret 2021): 11.
[20] "South Korea commemorates '*Comfort Women*' memorial day," *Kyodo News*, Agustus 2019.

Women. Salah satu langkah penting yang juga diambil Moon adalah memasukkan sejarah *Comfort Women* ke dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan generasi muda Korea Selatan tentang isu dan memastikan bahwa sejarah para korban tidak dilupakan. Moon jae-in juga mendukung pemulihan museum dan pusat penelitian *Comfort Women*, lalu melakukan penggalangan dukungan internasional guna menarik perhatian dunia terhadap isu tersebut, seperti mengakui serta mendukung perjuangan para korban dalam memperoleh hak-hak mereka.

Permasalahan *Comfort Women* pula bukan hanya masalah dalam hubungan historis Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga berkaitan dengan isu kemanusiaan yang dialami langsung oleh para korban. Pengalaman dan perjuangan para korban sangat penting untuk memahami kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Moon Jae-in, berdasarkan analisis tingkat individu Kenneth Waltz. Korban secara aktif menuntut keadilan seperti melakukan aksi protes, bersaksi di depan umum, dan mendukung keadilan melalui sarana hukum serta diplomatik. Merujuk pada hal tersebut, menunjukkan bahwa sangat penting bagi pemerintahan Moon Jae-in untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan yang lebih menguntungkan para korban karena kritik terhadap Perjanjian 2015 oleh pemerintahan Park Geun-hye mengabaikan representasi korban sebagai individu yang terlibat langsung dalam kejadian pada Perang Dunia tersebut. Di level negara, tekanan domestik yang termasuk didalamnya kelompok aktivis seperti (*Korean Council for Justice and Remembrance*), opini publik, dan dinamika politik memengaruhi kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap isu *Comfort Women* ini. Pemerintahan Moon Jae-in dihadapkan pada tuntutan dari berbagai bagian masyarakat untuk kebijakan yang lebih tegas dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. Kebijakan Korea Selatan pada masa Moon Jae-in mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan yang berbeda termasuk pembentukan yayasan rekonsiliasi dan meningkatkan program kesejahteraan bagi para korban seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam level sistem internasional, masalah *Comfort Women* menjadi komponen penting dari hubungan internasional terutama di Asia Timur. Jepang yang mengklaim bahwa perjanjian 1965 menyelesaikan semua klaim atas permasalahan kolonial, mendapat perhatian di tingkat global terutama oleh komite PBB yang berulang

kali meminta Jepang untuk mengakui tanggung jawab hukumnya dan memberikan kompensasi yang layak kepada para korban. Posisi *Comfort Women* dalam diplomasi regional juga semakin rumit ketika Amerika Serikat sebagai sekutu utama Korea Selatan dan Jepang, mendorong kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan sejarah ini demi stabilitas keamanan regional di tengah eskalasi konflik dengan Tiongkok dan Korea Utara. Hal ini menyebabkan pemerintahan Moon Jae-in dipaksa untuk mempertahankan keseimbangan antara memperjuangkan keadilan bagi korban dan aliansi strategis di kawasan.

Terlepas dari fakta bahwa banyak penelitian telah dilakukan tentang *Comfort Women*, sebagian besar telah berkonsentrasi pada aspek historis atau penderitaan korban selama perang. Kebijakan Moon Jae-in yang menolak perjanjian tahun 2015 dan mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia telah mengubah cara Korea Selatan menangani masalah *Comfort Women*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh kebijakan penanganan masalah *Comfort Women* pada masa kepemimpinan Moon Jae-in. Penemuan penelitian ini sangat penting untuk memahami seberapa efektif pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menyelesaikan masalah historis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana dampak kebijakan *Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015* pada pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022) terhadap pemenuhan hak-hak korban *Comfort Women* di Korea Selatan, khususnya dalam aspek keadilan, kompensasi, dan pengakuan?"

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan tentang dampak kebijakan Moon Jae-in terhadap hak-hak korban *Comfort Women* Korea Selatan, untuk memfokuskan penelitian dan menjamin analisis yang menyeluruh. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode Waktu: Penelitian ini akan difokuskan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in dari tahun 2017 hingga 2022, dengan menggunakan kebijakan sebelumnya

(Park Geun-hye) hanya sebagai konteks perbandingan untuk memahami perubahan yang terjadi selama masa kepemimpinan Moon Jae-in.

2. Ruang Lingkup Kebijakan: Penelitian ini hanya akan membahas kebijakan yang berkaitan langsung dengan upaya untuk memenuhi hak-hak para korban *Comfort Women*, seperti kompensasi finansial, layanan kesehatan dan dukungan psikologis, serta bantuan hukum dan sosial.

3. Cakupan Geografis: Penelitian ini terbatas pada wilayah Korea Selatan saja, tidak membahas secara mendalam dampak di negara lain. Namun, mencakup respons Jepang yang hanya berkaitan langsung dengan hak korban di Korea Selatan.

4. Sumber Data: Penelitian ini akan bergantung pada data sekunder yang mencakup laporan kebijakan dan pernyataan resmi pemerintah, laporan organisasi non-pemerintah, publikasi akademik, dokumentasi media serta publikasi lembaga internasional terkait isu dan pemenuhan hak-hak korban.

Pembatasan ini diperlukan untuk tetap fokus pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memperoleh analisis menyeluruh dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan Moon Jae-in dalam menangani masalah *Comfort Women* terhadap para korban di tingkat domestik Korea Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan-kebijakan *Comfort Women* yang diterapkan pemerintah Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in dalam upaya pemenuhan hak-hak korban, yang mencakup proses pelaksanaan program hingga hambatan implementasi kebijakan.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Moon Jae-in dalam pemenuhan hak korban, khususnya dalam aspek tekanan domestik Korea Selatan.

3. Mengevaluasi dampak kebijakan *Comfort Women* Moon Jae-in terhadap upaya pemenuhan hak korban.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional, terutama dalam hal pemahaman tentang bagaimana opini publik domestik berdampak pada kebijakan diplomatik dalam menangani masalah sensitif sejarah seperti *Comfort Women*.

2. Manfaat Praktis: Membantu pembuat kebijakan membuat strategi untuk menyelesaikan masalah sensitif berbasis sejarah yang mempertimbangkan keseimbangan antara tekanan domestik dan kepentingan diplomatik, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban perang. Selain itu, hasilnya dapat menunjukkan seberapa efektif hubungan antara pemerintah Korea Selatan dengan kelompok masyarakat sipil dalam menangani isu.

3. Manfaat Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman publik tentang kompleksitas penanganan *Comfort Women* baik di tingkat domestik maupun internasional. Sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antar politik domestik dan kebijakan luar negeri Korea Selatan dan memberikan kerangka analitis untuk studi kasus serupa di negara lain.

1.5 Studi Pustaka

Pada pembahasan mengenai kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan selama kepemimpinan Moon Jae-in, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan fokus pada aspek kebijakan, dampak, dan dinamika politik domestik yang kemudian dikaji dari segi teori yang digunakan, metodologi penelitian, dan temuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi penelitian ini di antara studi sebelumnya.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Hasil dan Metode Penelitian	Posisi Penelitian Saat Ini
1.	Wenjie LI (2021)	*Feminist Framing Of Comfort Women In News Media*[21]	Berdasarkan judul, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi media dalam membentuk pemahaman publik mengenai isu *Comfort Women*. Selain itu, Wenjie LI ingin melihat bagaimana pendekatan feminis digunakan untuk menganalisis masalah *Comfort Women*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung oleh kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks sosial dan budaya masing-masing negara sangat mempengaruhi representasi media terkait isu.	Tujuan dari penelitian saat ini adalah menganalisis kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan dengan berfokus pada kepemimpinan Presiden Moon Jae-in. Teori atau pendekatan yang digunakan berkaitan pula dengan feminisme, dikarenakan isu *Comfort Women* sangat terkait dengan hak-hak perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif untuk memungkinkan tentang kompleksitas dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak korban.
2.	Mi Jin Cho (2020)	*Victim Silencing, Sexual Violence Culture, Social Healing: Inherited Collective Trauma of World War II South Korean Military "Comfort Women"*[22]	Cho menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan melihat literatur sejarah, wawancara, dan data organisasi yang berfokus pada hak-hak perempuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana trauma yang dialami oleh "*Comfort Women*" mempengaruhi identitas kolektif masyarakat Korea Selatan dan individu. Selain itu, Cho menekankan betapa	Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat dokumen kebijakan hingga literatur review yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban di Korea Selatan. Salah satu tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Moon Jae-in dalam pemenuhan hak korban, terutama dalam aspek tekanan domestik Korea Selatan.

[21] Wenjie Li, "FEMINIST FRAMING OF *COMFORT WOMEN* IN NEWS," (2021).
[22] Mi Jin Cho, "Victim Silencing, Sexual Violence Culture, Social Healing: Inherited Collective Trauma of World War II South Korean Military '*Comfort Women*," (2020).

			pentingnya mengakui dan memverifikasi pengalaman korban sebagai langkah pertama menuju penyembuhan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun platform yang aman bagi para korban untuk berbagi kisah mereka adalah kebutuhan mendesak, dan kerja sama antara pemerintah dan kelompok hak perempuan sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Cho berusaha untuk menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman *Comfort Women* sangat penting untuk keadilan individu dan sosial yang lebih luas di Korea Selatan dengan menggabungkan teori trauma kolektif dan feminis.	
3.	Arizki Putri Candelaria (2023)	Konstruksi Predominant Leader dalam Kebijakan Moon Jae In Terhadap Jepang dalam Isu *Comfort Women* pada Tahun 2017-2022[23]	Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis kebijakan Presiden Moon Jae-in terhadap Jepang dalam isu *Comfort Women*. Metode penelitian ini didasarkan pada penelitian literatur sebelumnya serta untuk menjamin keakuratan dan relevansi informasi, penulis juga menggunakan metode analisis model interaktif. Teori predominant leader digunakan dalam penelitian ini, sehingga	Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, hanya saja berfokus pada kebijakan domestik Korea Selatan. Metode penelitian pun didasarkan pada literatur review yang relevan dengan penelitian sehingga mampu memberikan gambaran tentang dampak kebijakan dalam pemenuhan hak-hak korban. Teori feminisme digunakan dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana kebijakan mempengaruhi pemenuhan hak-hak korban dari

[23] Arizki Putri Candelaria, "Konstruksi Predominant Leader dalam Kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *Comfort Women* pada Tahun 2017-2022," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 2 (30 Desember 2023): 29–43, https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i2.142.

			penulis mampu melihat bagaimana Moon Jae-in sebagai pemimpin Korea Selatan, memutuskan masalah *Comfort Women* dengan mempertimbangkan situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas masalah *Comfort Women* dan menganalisis kebijakan luar negeri Presiden Moon Jae-in. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kebijakan Moon Jae-in terhadap Jepang mencerminkan upaya untuk mendapatkan keadilan prosedural bagi para korban yang masih hidup, meskipun begitu masih ada tantangan dan ketegangan dalam hubungan Korea Selatan-Jepang.	perspektif gender dan keadilan.
4.	Zahra Ramadhani Fitria (2024)	Diplomasi dan Negosiasi Korea Selatan Terhadap Isu *Comfort Women* Pada Era Moon Jae-In[24]	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintah, dinamika hubungan diplomatik dengan Jepang, dan proses negosiasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diplomasi Korea Selatan telah mencapai beberapa kemajuan, masih ada masalah yang perlu ditangani untuk memberikan keadilan bagi	Penelitian juga berupa analisis kualitatif, yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang kebijakan pemerintah Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in terkait isu *Comfort Women*, terutama terkait pemenuhan hak-hak korban.

[24] Zahra Ramadhani Fitria, "DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU *COMFORT WOMEN* PADA ERA MOON JAE-IN," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.

			para korban.	
5.	Dr. Ine Kusuma Aryani, M.Pd.	"*Comfort Women*" Korea Selatan, Karakter Yang Terlupakan[25]	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari masalah *Comfort Women*, yang merupakan salah satu dampak dari Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami arti dan pengalaman yang dialami oleh para korban, serta untuk mempelajari konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi masalah tersebut. Penelitian ini berfokus pada norma sosial dan bagaimana norma tersebut berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Peneliti menggunakan pendekatan Konstruktivis, yang menekankan betapa pentingnya pemahaman sosial dalam membentuk kebijakan dan tindakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengakui dan mengembalikan hak para korban, banyak orang merasa bahwa upaya tersebut masih tidak memadai.	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari masalah *Comfort Women* yang disimpan dalam diam, bahkan setelah Perang Dunia II berakhir. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dampak kebijakan Moon Jae-in terhadap pemenuhan hak-hak korban *Comfort Women*. Peneliti menggunakan pendekatan feminisme untuk memahami pengalaman perempuan dalam konteks perang.

1.6 Kerangka Dasar Pemikiran

1.6.1 Feminisme Postkolonial (Gayatri Chakravorty Spivak)

Feminisme adalah gerakan yang didirikan bagi kaum wanita untuk menentang segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kekuatan yang berkuasa. Selama berabad-abad, perempuan telah

[25] Ine Kusuma Aryani "*Comfort Women* Korea Selatan, Karakter yang Terlupakan." PRIMARY. 2022.

diperlakukan sebagai kelompok subordinat dalam berbagai aspek kehidupan seperti di rumah, masyarakat, maupun politik dan ekonomi. Dalam reaksi terhadap ketidaksetaraan ini, teori feminisme muncul yang mana berasal dari masa pencerahan di Eropa, ketika konsep hak asasi manusia dan kebebasan individu berkembang. Mary Wollstonecraft, seorang filsuf dan penulis asal Inggris yang juga dianggap sebagai pelopor feminisme, menerbitkan bukunya berjudul *A Vindication of The Rights of Woman* pada tahun 1792 menekankan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses ke pendidikan dan kesempatan sosial lainnya.[26]

Pada abad ke-19, feminisme menjadi lebih luas dan semakin berfokus pada perjuangan politik. John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom Inggris, menulis *The Subjection of Women* (1869) bersama istrinya Harriet Taylor Mill. Buku itu mengkritik sistem patriarki dan menegaskan bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal ekonomi dan politik. Pada masa ini, gerakan feminisme berkonsentrasi pada perjuangan hak-hak dasar perempuan, seperti hak pendidikan, pekerjaan, dan terutama hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan. Teori feminisme menjadi lebih kompleks seiring waktu, terutama pada abad ke-20. Gelombang pertama feminisme, yang terjadi sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20 lebih banyak berkonsentrasi pada perjuangan hak-hak politik dan hak pilih perempuan, yang akhirnya berhasil di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Namun, gelombang kedua feminisme muncul pada pertengahan abad ke-20 dan berfokus pada masalah sosial budaya yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi berbagai aliran atau cabang dengan pandangan berbeda untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Terdapat feminisme yang berfokus pada kesetaraan dalam sistem hukum, politik dan ekonomi (feminisme liberal), perubahan sosial mendasar atau patriarki dalam masyarakat (feminisme radikal), penindasan perempuan terkait dengan sistem kapitalisme (feminisme marxis dan sosialis), diskriminasi berlapis berdasarkan ras, kelas dan faktor-faktor yang beragam (feminisme interseksional), dan

[26] Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman* (London: J. Johnson, 1792).

termasuk pula di dalamnya yaitu feminisme postkolonial. Penulis menggunakan feminisme postkolonial karena berkaitan untuk menganalisis kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan sebagai negara bekas jajahan Jepang.

Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Postkolonial yang dikembangkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Spivak adalah seorang ahli teori sastra India yang lahir pada 24 Februari 1942 di Kalkuta (sekarang Kolkata), dan menjadi salah satu tokoh feminisme yang berpengaruh. Menurut Spivak, feminisme postkolonial tidak hanya memperhatikan penindasan berbasis gender, namun juga memperhatikan hubungan antara penindasan berbasis gender, kolonialisme, ras, dan kelas.

> "*Postcolonial feminism seeks to understand how women in the Global South experience the legacies of colonialism and the multiple forms of oppression that they face, both as women and as colonized subjects. It is an attempt to address the gap between Western feminist discourse and the lived experiences of women who have been historically marginalized."* [27]
> Gayatri Chakravorty Spivak.

Melalui karyanya yang terkenal "*Can the Subaltern Speak*?", Spivak mengembangkan pemahaman tentang posisi perempuan dalam konteks postkolonial. Gagasan utamanya berfokus pada bagaimana perempuan dari negara-negara bekas jajahan mengalami "*double colonization*" atau penindasan berlapis sebagai subjek kolonial dan sebagai perempuan dalam sistem patriarki. Subalternitas adalah masalah utama postkolonialisme, menurut Spivak. Ia menekankan bahwa kelompok subaltern, terutama perempuan dari negara bekas kolonial, seringkali tidak memiliki akses untuk menyuarakan pengalaman mereka dalam struktur kekuasaan global. Sehingga sangat penting untuk mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, ini sejalan dengan upaya pemerintah Moon Jae-in untuk memberikan kesempatan kepada para korban untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendapatkan pengakuan.

Teori Feminisme Postkolonial Spivak menjadi pilihan paling relevan

[27] Gayatri Chakravorty Spivak, *"Postcolonial Feminism: Understanding the Legacy of Colonialism,"* dalam *The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues*, ed. Sarah Harasym (London: Routledge, 1990), 35.

dalam konteks *Comfort Women* karena mampu menjelaskan kekerasan sistematis yang dialami perempuan Korea yang berakar pada dua sistem opresi yaitu kolonialisme Jepang dan patriarki. Para *Comfort Women* tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga dilecehkan sebagai warga negara jajahan. Kondisi ini mencerminkan konsep subalternity Spivak, di mana korban kehilangan suara dan identitas mereka. Dalam menganalisis kebijakan Moon Jae-in, teori ini membantu memahami kompleksitas upaya penyelesaian yang tidak hanya menyangkut kompensasi material, tetapi juga pemulihan martabat dan identitas yang telah dirampas selama kolonialisme. Ini termasuk hal-hal seperti pengakuan sejarah, permintaan maaf resmi, dan upaya untuk mengobati trauma para korban. Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa kebijakan terkait *Comfort Women* harus dilihat dalam konteks sejarah kolonial dan perjuangan postkolonial yang berkelanjutan, tidak hanya sebagai isu gender atau HAM semata. Dengan menggunakan teori Feminisme Postkolonial Spivak, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang cara kebijakan Moon Jae-in mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan, termasuk tuntutan keadilan para korban, hubungan diplomatik dengan Jepang, dan upaya pemulihan martabat Korea Selatan.

Kebijakan Moon Jae-in tentang masalah *Comfort Women* menunjukkan upaya sulit untuk menyelesaikan warisan kolonial sambil mempertahankan hubungan diplomatik dengan Jepang. Pada tahun 2017, Moon Jae-in membentuk *Task Force* khusus untuk meninjau ulang kesepakatan 2015 antara Korea Selatan dengan Jepang, yang menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan para korban. Atas dasar kebijakan ini, kesepakatan tersebut diperkuat dan didirikan *Reconciliation and Healing Foundation*, yang memberikan dana kompensasi untuk mendukung langsung korban *Comfort Women* di Korea Selatan. Meskipun ketegangan diplomatik muncul, Moon Jae-in juga melakukan langkah besar dengan memasukkan isu *Comfort Women* ini ke dalam agenda bilateral dengan Jepang. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang lebih berfokus pada korban, dalam hal pengakuan sejarah dan pemulihan martabat.

Dalam menganalisis kebijakan pemerintah Moon Jae-in terkait *Comfort Women*, penelitian ini menggunakan teori feminisme postkolonial dari Gayatri Spivak. Teori ini relevan karena menyoroti bagaimana perempuan dari kelompok terpinggirkan seperti korban *Comfort Women*, sering kali kehilangan suara dan otonomi dalam narasi sejarah yang didominasi negara dan kekuasaan kolonial. Spivak melalui konsep subaltern menekankan pentingnya mendengarkan suara mereka yang "tidak dapat berbicara" dalam struktur dominasi, baik secara politik maupun diplomatik. Penerapan teori dalam konteks penelitian ini membantu menganalisis bagaimana kebijakan Moon Jae-in berusaha merestorasi suara korban *Comfort Women* yang dapat diposisikan sebagai subaltern, yang dilakukan melalui testimoni, museum sejarah, serta penolakan terhadap pendekatan diplomatik yang menekan hak korban. Dengan demikian, teori Spivak memberikan justifikasi teoretis terhadap pendekatan berbasis hak asasi manusia yang diambil pemerintah Moon Jae-in, serta menjelaskan dinamika kekuasaan yang masih membungkam korban dalam relasi Korea Selatan-Jepang. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memberi ruang representasi bagi korban sebagai agen sejarah. Oleh karena itu, teori Spivak akan digunakan sebagai analisis untuk menilai keberpihakan dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak korban *Comfort Women* secara adil dan setara.

1.6.2 *Gender Mainstreaming* (Caroline Moser)

Gender Mainstreaming adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta proyek di berbagai bidang pembangunan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi pada Konferensi Keempat Dunia tentang Wanita di Beijing tahun 1995, yang kemudian ditetapkan dalam *Beijing Platform for Action* (BPfA) sebagai strategi utama untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak saat itu, konsep ini telah berkembang menjadi pendekatan global yang bertujuan untuk memasukkan pertimbangan gender ke dalam semua aspek pembangunan.

Caroline Moser, sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangan konsep ini, memberikan definisi komprehensif tentang *gender mainstreaming*.

Menurut Moser, *gender mainstreaming* adalah “proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program, di semua bidang dan semua tingkatan.” Moser menekankan bahwa *gender mainstreaming* merupakan pendekatan transformatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan gender dimasukkan ke dalam semua aspek program dan kebijakan.

> *"The process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring, and evaluation of policies and programs in all political, economic, and societal spheres so that women and men benefit equally, and inequality is not perpetuated."*[28] Caroline Moser.

Dalam konteks penelitian ini yang membahas kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae-in, konsep *gender mainstreaming* menjadi penting karena mampu menawarkan kerangka evaluasi yang mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik korban perempuan. Isu *Comfort Women* sendiri adalah permasalahan historis yang berakar pada ketimpangan gender menjadi krusial. Penerapan *gender mainstreaming* memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan pemerintah Korea Selatan telah mengintegrasikan perspektif gender, misalnya melalui pengakuan pengalaman korban, pelibatan dalam proses penyusunan kebijakan, serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Dengan menggunakan konsep ini, penelitian dapat menganalisis apakah kebijakan Moon Jae-in berhasil mengatasi hambatan-hambatan struktural yang selama ini meminggirkan korban, atau justru mereproduksi ketidakadilan lama dalam bentuk baru. Secara langsung, konsep *gender mainstreaming* relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini karena memberikan alat analisis untuk menilai efektivitas dan keberpihakan kebijakan dalam memenuhi hak-hak korban *Comfort Women*, baik dari aspek keadilan, kompensasi, maupun representasi. Dengan demikian, pendekatan ini

[28] Caroline Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993), 231.

membantu menghubungkan antara tujuan kebijakan dan kenyataan yang dihadapi korban di lapangan.

Pemerintahan Moon Jae-in telah berusaha menerapkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender melalui berbagai inisiatif kebijakan, salah satunya adalah pembentukan Komite Khusus untuk penyelesaian isu *Comfort Women* pada 2017 dengan pengembangan program dukungan bagi para korban yang mencakup aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemulihan psikologis. Konsep *gender mainstreaming* digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan Moon Jae-in yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Jepang dan memastikan bahwa suara para korban didengar dalam proses kebijakan. Dalam konteks ini, kelompok advokasi seperti *The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan* (KCJR) memainkan peran penting sebagai perwakilan suara korban dalam diskusi kebijakan. KCJR secara aktif terlibat dalam mendorong pemerintah untuk membatalkan perjanjian 2015 yang dianggap tidak mewakili aspirasi korban, serta mendesak pemerintah agar mengedepankan prinsip-prinsip keadilan transisional dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Melalui konsep ini menunjukkan bahwa masalah *Comfort Women* tidak hanya dianggap sebagai masalah historis, tetapi juga sebagai masalah gender yang membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan struktural dalam masyarakat. Dengan menggunakan konsep *gender mainstreaming* sebagai kerangka analisis, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam tentang sejauh mana kebijakan *Comfort Women* di bawah kepemimpinan Moon Jae-in mempertimbangkan dampak khusus terhadap para korban perempuan, serta bagaiman kebijakan tersebut mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan keadilan bagi korban. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan kontribusi penting dalam evaluasi kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan selama pemerintahan Moon Jae-in. Pemilihan metode ini didasarkan pada

kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh kompleksitas kebijakan yang diambil dan bagaimana hal itu berdampak pada penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan metodologis yang saling melengkapi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif.

Pertama, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara detail kebijakan pemerintah Moon Jae-in terkait masalah *Comfort Women*. Ini termasuk strategi pemerintah Korea Selatan untuk menangani masalah, seperti membuat perjanjian bilateral, menanggapi tuntutan korban, dan proses negosiasi dengan Jepang. Selanjutnya, elemen analitis diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Analisis ini menggunakan kerangka teoritis yang berbasis pada konsep *gender mainstreaming* dan teori feminisme postkolonial. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan sejauh mana kebijakan mengatasi kebutuhan *Comfort Women*, yang sebagian besar adalah perempuan, dan dampaknya terhadap perjuangan untuk keadilan dan rekonsiliasi historis.

1.7.1 Unit Analisa

Dalam penelitian, menggunakan level analisa oleh Kenneth Waltz yang mengemukakan bahwa terdapat 3 level yaitu individu, negara, dan sistem internasional. Penelitian ini dilakukan pada tiga tingkatan yang saling berkaitan. Pada tingkat individu, fokus penelitian diarahkan pada pengalaman dan dampak langsung kebijakan terhadap para korban *Comfort Women*, terutama perempuan-perempuan lanjut usia yang masih memperjuangkan keadilan. Pada tingkat nasional, analisis mencakup implikasi kebijakan terhadap politik domestik Korea Selatan, termasuk respon masyarakat sipil dan tekanan dari kelompok advokasi. Sedangkan pada tingkat internasional, penelitian mengeksplorasi pengaruh kebijakan terhadap hubungan bilateral Korea Selatan-Jepang serta posisi isu *Comfort Women* dalam konteks diplomasi regional dan global.

Interaksi antara ketiga level analisis ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan *Comfort Women* pada era Moon Jae-in mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan diplomatik. Keterkaitan antar level analisis juga membantu mengungkap kompleksitas

hubungan antara keputusan politik di tingkat nasional dengan dampaknya terhadap para korban dan dinamika hubungan internasional.

1.7.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penting dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup berbagai dokumen, laporan, dan publikasi relevan dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan berkaitan dengan masalah *Comfort Women* selama masa kepemimpinan Moon Jae-in. Dokumen ini termasuk kebijakan, pernyataan, dan rilis resmi pemerintah Korea Selatan dari tahun 2017 hingga 2022. Contohnya adalah perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Jepang tentang masalah *Comfort Women*, pernyataan publik Presiden Moon Jae-in, dan laporan resmi dari kementerian atau lembaga yang menangani masalah ini, seperti Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis dengan menggunakan metode analisis isi dan triangulasi sumber. Ini sangat penting mengingat sensitivitas isu *Comfort Women*. Tahap pertama melibatkan proses verifikasi dan validasi data melalui teknik triangulasi sumber. Dalam tahap ini, informasi dari berbagai sumber dibandingkan dan diverifikasi silang untuk memastikan validitas data. Proses ini mencakup pemeriksaan keaslian dan kredibilitas sumber, mulai dari dokumen resmi pemerintah hingga publikasi akademik dan liputan media. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan dan disusun berdasarkan tema, periode, dan relevansinya dengan tujuan penelitian.

Tahap kedua fokus pada analisis isi yang melibatkan pengkodean data berdasarkan tema-tema utama seperti respons pemerintah terhadap tuntutan korban, integrasi perspektif gender dalam kebijakan, dan dinamika hubungan Korea Selatan-Jepang. Peneliti juga melibatkan perbandingan kebijakan Moon Jae-in dengan pemerintahan sebelumnya untuk mengidentifikasi perubahan pendekatan dalam penanganan *Comfort Women*. Tahap ketiga melibatkan analisis teoritis menggunakan kerangka *gender mainstreaming* dan feminisme

postkolonial. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data melalui perspektif teoritis yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan penelitian, dan literatur relevan. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang dimensi gender dan konteks postkolonial dalam kebijakan *Comfort Women*.

1.8 Argumen Dasar

Dalam konteks sejarah yang kompleks dan penuh luka, kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam mengakui dan memenuhi hak-hak korban. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual selama masa perang tidak hanya merupakan isu individu, tetapi juga hak asasi manusia, sosial dan politik yang mendalam. Isu *Comfort Women* bukan sekadar persoalan sejarah, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dampaknya terus mempengaruhi generasi berikutnya. Di bawah kepemimpinan Moon Jae-in, terdapat upaya signifikan untuk mereformasi kebijakan terkait *Comfort Women* yang mencakup pengakuan, permohonan maaf, dan kompensasi bagi para korban. Kebijakan seperti peninjauan ulang kesepakatan tahun 2015 menunjukkan pendekatan progresif dalam upaya penyelesaian masalah ini, menekankan pentingnya pemulihan hak korban di atas upaya diplomatik semata.

Namun, implementasi kebijakan Moon Jae-in menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tekanan domestik dan internasional. Di tingkat domestik, kebijakan harus merespons tuntutan masyarakat sipil yang menginginkan pengakuan penuh atas penderitaan korban. Sementara di tingkat internasional, Korea Selatan harus tetap mempertimbangkan hubungan strategisnya dengan Jepang. Pelaksanaan kebijakan seringkali terjebak di antara simbolisme politik dan kebutuhan nyata korban, yang menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Dalam hal ini, penelitian menekankan bahwa kebijakan publik terkait isu sensitif seperti *Comfort Women* tidak dapat dilihat hanya sebagai upaya diplomasi atau penyelesaian sejarah. Kebijakan tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, mencakup dinamika domestik, relasi kuasa global, dan perhatian terhadap hak-hak korban sebagai perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengkaji dampak kebijakan Moon Jae-in terhadap pemenuhan hak-hak korban, serta bagaimana suara dan pengalaman perempuan yang terdampak dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tentang kebijakan sejarah dan hak asasi manusia, tetapi juga menawarkan pembelajaran berharga bagi pengambil kebijakan di negara lain yang menghadapi masalah serupa.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian "Analisis Kebijakan *Comfort Women* di Korea Selatan Pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in" disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara logis untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang topik yang diteliti. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan *Comfort Women* sebagai isu yang kompleks, selanjutnya memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta studi pustaka atau literatur review yang dapat memperkuat analisis penelitian ini. Kerangka pemikiran dan metodologi penelitian juga dijabarkan untuk memberikan fondasi yang kuat bagi analisis di bab selanjutnya.

BAB II Dinamika *Comfort Women* di Korea Selatan

Bab ini akan membahas dinamika kebijakan *Comfort Women* dengan cara yang komprehensif, menguraikan sejarah, pengalaman dan dampak yang dialami, hingga keberadaan korban *Comfort Women* pada masa Park Geun-hye dan Moon Jae-in.

BAB III Kebijakan *Comfort Women* Pada Masa Kepemimpinan Moon Jae-in

Pada bab ini, menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil pemerintahan Moon Jae-in dalam menangani isu *Comfort Women*, terutama kebijakan yang berbasis hak asasi manusia. Fokus utama diberikan pada

peninjauan ulang terhadap *Japan South-Korea Agreement on Comfort Women 2015*, pembentukan Komite Khusus, penyediaan dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban, serta pelibatan kelompok advokasi seperti KCJR dalam proses penyusunan kebijakan.

BAB IV Respon Atas Kebijakan *Comfort Women* Pada Era Moon Jae-in Dalam Pemenuhan Hak-hak Korban

Bab empat ini membahas respon yang muncul atas kebijakan-kebijakan tersebut, baik dari pihak korban, kelompok advokasi, masyarakat sipil, hingga pemerintah Jepang. Analisis mencakup tanggapan terhadap penolakan *Japan South-Korean Agreement on Comfort Women 2015*, evaluasi atas efektivitas program dukungan korban, serta sejauh mana kebijakan Moon Jae-in direspons sebagai bentuk pemenuhan hak atas keadilan, kompensasi, dan pengakuan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini, akan membahas kesimpulan berdasarkan penelitian.

BAB II

DINAMIKA *COMFORT WOMEN* DI KOREA SELATAN

Masalah *Comfort Women* masih menjadi salah satu perbincangan yang terus diperdebatkan dan seringkali sebagai penyebab konflik di antara Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini. Adanya *Reconciliation and Healing Foundation* yang dibentuk pada 28 Juli 2016 di bawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye sebagai yayasan untuk mengembalikan hak martabat korban *Comfort Women*, menghadapi berbagai masalah dalam proses pelaksanaannya seperti respon negatif penolakan dari masyarakat Korea Selatan. Kim Tae-hyeon, direktur yayasan tersebut kemudian menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri pada pertengahan Juli 2017[29] di masa pemerintahan Moon Jae-in. Selama pemerintahannya, Presiden Moon Jae-in membentuk satuan tugas di Kementerian Luar Negeri untuk meninjau kembali *Comfort Women Agreement*, termasuk *Reconciliation and Healing Foundation*. Sehingga, lima dari delapan direktur yang tersisa mengajukan surat pengunduran diri ke kantor yayasan sehari sebelum *Task Force* menerbitkan laporan hasil peninjauan di bulan Desember 2017. Dengan hanya tiga direktur pemerintahan yang tersisa, *Reconciliation and Healing Foundation* tidak dapat beroperasi dengan efektif, bahkan hampir tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. *Korean Council for Justice and Remembrance* memposisikan gerakan demonstrasi di depan kantor Kementerian Luar Negeri serta *Reconciliation and Healing Foundation*, untuk meminta pembubaran yayasan segera. Berdasarkan hal tersebut, di sela-sela Sidang Umum PBB pada 25 September 2018, Moon Jae-in menyatakan bahwa yayasan tersebut gagal berfungsi seperti seharusnya sehingga harus dibubarkan.[30] Pemerintah

[29] "Former comfort woman calls for disbandment of false 'Reconciliation and Healing' Foundation," *The Hankyoreh*, Desember 2018, https://english.hani.co.kr.

[30] "Moon hints to Abe that *Reconciliation and Healing Foundation* needs to be disbanded," *The Hankyoreh*, 27 September 2018, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/863576.html.

Korea Selatan kemudian menggunakan anggaran sendiri untuk mengganti dana Jepang[31] yang digunakan pada *Reconciliation and Healing Foundation*.

Berbanding dengan pemerintahan sebelumnya (Park Geun-hye), kepemimpinan Moon Jae-in di Korea Selatan dalam melihat masalah *Comfort Women* dilakukan dengan cara yang berbeda. Pemerintahannya mengakui penderitaan korban dan secara terbuka meminta maaf atas tindakan Jepang yang melibatkan wanita Korea Selatan sebagai objek kekerasan seksual selama Perang Dunia II.[32] Selain itu terdapat dasar untuk diskusi lebih lanjut dengan Jepang, dimana pemerintah Moon Jae-in meninjau kembali perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Jepang yang ditandatangani pada tahun 2015 karena dianggap tidak memadai untuk menangani masalah *Comfort Women*. Pemerintah Moon Jae-in berkomitmen untuk meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi para korban dengan berusaha mendapatkan dukungan internasional terkait tuntutan terhadap Jepang. Dalam menangani masalah *Comfort Women*, pemerintah Moon Jae-in menekankan aspek moral dan etika termasuk keadilan, pengakuan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan penolakan penggunaan kekerasan seksual sebagai instrumen perang.

2.1 Sejarah *Comfort Women*

Korea Selatan dan Jepang telah berperang sejak abad ke-7, yaitu ketika Jepang melakukan invasi dengan membantu Kerajaan Baekje Korea melawan Kerajaan Silla. Pada tahun 1868, Jepang mulai melakukan intervensi politik domestik di Korea dan intervensi politik di luar negeri pada 1904. Dalam hal ini, untuk memperebutkan kekuasaan di Korea, Jepang juga melakukan Perang Cina-Jepang (*Sino-Japanese War 1894-1895*) dan Rusia-Jepang (*Russo-Japan War 1904-1905*).[33] Atas kemenangan dalam dua perang tersebut, Jepang memperoleh kedaulatan Korea sebagai koloni pada 29 Agustus tahun 1910 melalui *Japan-*

[31] Kang Hyunmin, "South Korea Decides to Dismantle '*Comfort Women*' *Reconciliation and Healing Foundation*," *The Diplomat*, 27 November 2018.

[32] "South Korea Urges Japan Issue Heartfelt Apology to *Comfort Women*," *VOA News*, 10 Januari 2018.

[33] Zahra Ramadhani Fitria, "DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU *COMFORT WOMEN* PADA ERA MOON JAE-IN," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024, 107.

Korea Annexation Treaty[34] atau Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Menurut Jepang, aneksasi dibuat untuk menjamin keamanan nasional, perdamaian di Asia Timur, kesejahteraan dan kemakmuran di Korea, dan untuk mengkonsolidasikan kepentingan Jepang serta Korea di Asia Timur.

Tabel 2. 1 Awal Mula Kependudukan Jepang di Korea

Tahun	Peristiwa	Deskripsi
Abad ke-7	Awal konflik	Pertikaian awal antara Korea dan Jepang, termasuk invasi Jepang ke Korea.
1868	Restorasi Meiji	Jepang mulai melakukan intervensi politik domestik di Korea.
1894-1895	Perang Cina-Jepang	Jepang mengalahkan Tiongkok dan mendapatkan pengaruh di Korea.
1904-1905	Perang Rusia-Jepang	Jepang mengalahkan Rusia, memperkuat posisinya di Korea.
1910	Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea	Korea secara resmi dijadikan koloni oleh Jepang.

Selama tahun 1930-an, kemiskinan ekonomi Korea menjadi semakin parah dan prostitusi terlihat menarik bagi perempuan-perempuan yang menganggur.[35] Namun, tidak semua perempuan di Korea saat itu yang terlibat dalam pekerjaan seks melakukannya secara sukarela. Ketika memulai persiapan perang pada akhir 1930-an, Jepang memaksa semua orang yang dianggap cukup umur untuk menjadi tentara dan mengurung ribuan wanita dari seluruh Asia di rumah bordil militer untuk menjadi budak seks tentara Jepang di medan perang, yang kemudian dikenal sebagai "*Comfort Women*".

[34] *Ibid.*
[35] Yonson Ahn, "Whose comfort? Body, sexuality and identities of Korean '*Comfort Women*'and Japanese soldiers during WWII", *World Scientific*, 2020: 10–12.

Kasus *Comfort Women* terjadi saat Jepang menduduki semenanjung Korea Selatan pada tahun 1910 dan berlanjut selama Perang Dunia II[36] (hingga 1945). *Comfort Women* juga dikenal sebagai *Jugun Ianfu* di Jepang dan *Ilbonkun Wianbu* di Korea, adalah wanita yang dipekerjakan secara paksa sebagai budak seksual militer Jepang. Para sarjana Jepang mendefinisikan *Comfort Women* sebagai wanita yang direkrut ke kamp penampungan yang didirikan di medan perang oleh tentara dan angkatan laut Jepang, serta wanita yang melayani dan menjadi budak seks bagi tentara Jepang sesuai dengan perintah pemerintah atau tentara Jepang sejak insiden Shanghai tahun 1932 hingga kekalahan Jepang pada 1945.[37] Istilah "*comfort*" atau penghibur dinyatakan tidak tepat dikarenakan dalam kenyataannya, mereka adalah korban pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan oleh militer Jepang sehingga PBB dan Organisasi Perempuan menyebut para korban sebagai "budak seks militer" di kamp atau *Comfort Stations*.

2.1.1 Pembentukan Sistem *Comfort Stations*

Sebelum Perang Dunia II, rumah bordil sudah ada di militer Jepang yang mana Okamura Teiji, seorang wakil kepala staf militer Jepang mendirikan *Comfort Stations* pertama kali di Shanghai pada tahun 1932. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian pada masalah pemerkosaan tentara Jepang. Namun, sistem *Comfort Women* terutama dibangun setelah insiden Shanghai yang diikuti dengan *The Rape of Nanking* pada 1937 setelah Jepang menginvasi Manchuria (1931) dan kemudian menyebar ke seluruh Tiongkok. Pemerintah Jepang pada 13 Desember 1937 memutuskan untuk menghancurkan kota Nanking, dan kemudian melakukan pembantaian (pemerkosaan serta pembunuhan) terhadap sedikitnya 20.000 hingga 80.000 perempuan selama enam minggu untuk menghentikan penentangan Tiongkok.[38] Peristiwa ini memperoleh kecaman dari pers internasional yang juga menyebabkan masyarakat internasional takut sehingga

[36] Arizki Putri Candelaria, "Konstruksi Predominant Leader dalam Kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *Comfort Women* pada Tahun 2017-2022," *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 2 (30 Desember 2023): 36.
[37] Ziyang Zhou, "On the Japanese Government's Implementation of the '*Comfort Women*' System," *Frontiers in Business, Economics and Management* 10, no. 2 (14 Agustus 2023): 132–135, https://doi.org/10.54097/fbem.v10i2.10893.
[38] Sigit dan Farin Almira Anantasya, "*Comfort Women*: Impacts on Japan's Relations with South Korea and The Philippines," *Malaysian Journal of International Relations* 9, no. 1 (30 Desember 2021): 148–50, https://doi.org/10.22452/mjir.vol9no1.8.

merusak reputasi Jepang. Setelah peristiwa Nanking, Jepang membangun rumah bordil yang dikenal sebagai *Comfort Stations* untuk memperbaiki reputasi negara. Hirohito, kaisar Jepang memutuskan memerintahkan militer untuk memperluas *Comfort Stations* demi menghindari masalah lebih lanjut, dan mengurangi *Sexually Transmitted Diseases* (STDs) atau penyakit menular seksual. [39]

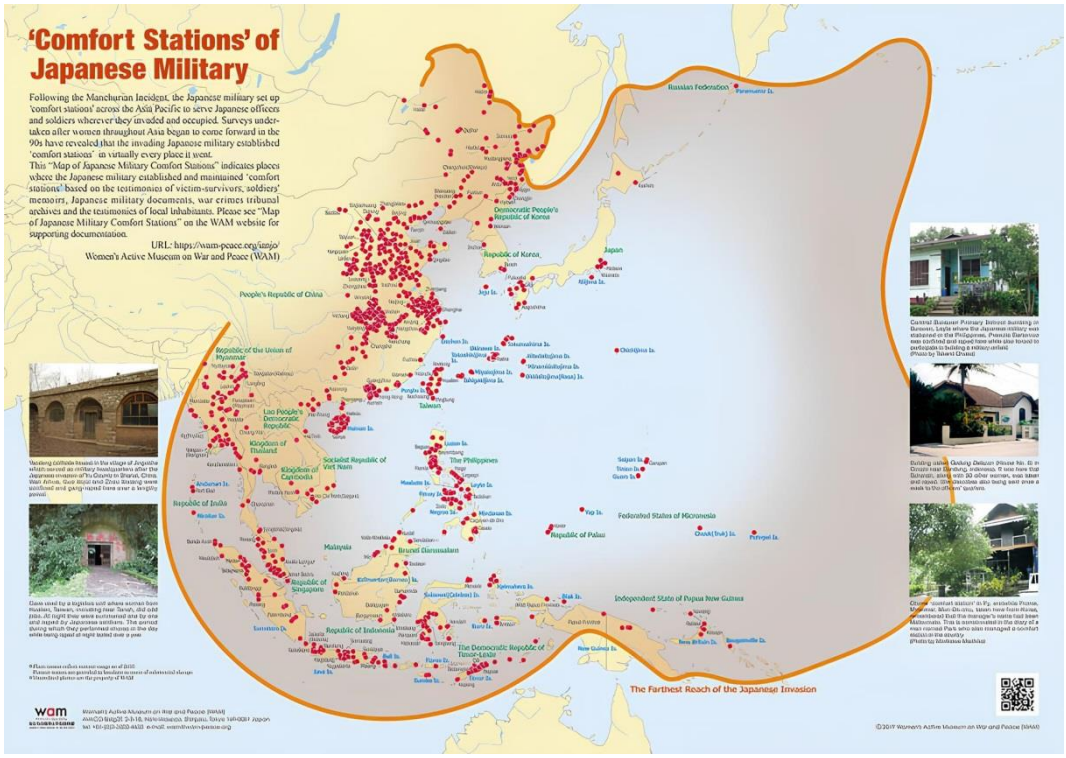

Gambar 2. 1 Peta Penyebaran *Comfort Stations*

Sumber: Women's Active Museum on War and Peace (WAM)

Sistem *Comfort Women* secara ketat diatur oleh militer Jepang, terutama terkait dengan pengawasan *Comfort Stations*. Terdapat regulasi yang mengatur operasi *Comfort Stations* termasuk bagaimana pelayanan dan biaya yang dikenakan kepada tentara dalam menggunakan jasa para perempuan. Dalam hal ini ialah "*Regulations for the Use of Comfort Stations*" yang menetapkan waktu kunjungan prajurit serta detail biaya berdasarkan kewarganegaraan.[40] Regulasi mengharuskan perempuan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin untuk

[39] *Ibid.*
[40] Jimin Kim, Beverly Milner, dan Sunghee Shin, "Teaching about the *Comfort Women* during World War II and the Use of Personal Stories of the Victims," *Education About Asia 24,* no.3 (Winter 2019): 58-63.

mendeteksi infeksi menular seksual. Wanita yang dianggap sebagai *Comfort Women* biasanya dikirim dan ditugaskan dari satu tempat ke tempat lain dengan kapal kargo militer. Proses ini diawasi oleh Kementerian Perang Jepang yang memastikan bahwa operasi dilakukan di bawah kendali militer penuh. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi *Comfort Stations* mencakup militer Jepang, Kementerian Perang Jepang dan komando militer, manajer stasiun (pekerja), hingga para tentara.

Chapter IX Regulations for the Use of *Comfort Stations*

Clause 59 Basic Principle
To help to enforce military discipline by providing ways for relaxation and comfort
Clause 60 Facilities
Comfort Stations are set up inside the south walls of Nikka Hall…
Visiting days are appointed to each unit.
Hoshi unit -- Sunday.
Kuriiwa unit -- Monday and Tuesday.
Matsumura unit -- Wednesday.and Thursday.
Narita unit -- Saturday.
Achiwa unit -- Friday.
Murata unit -- Sunday.
Clause 61 Price and Time
1 For non-commissioned officers and enlisted men *Comfort Stations* are open from 9:00 to 18:00
2 Price
Time limit is one hour for one man.
Chinese -- 1 yen
Korean -- 1 yen 50 sen
Japanese -- 2 yen
Clause 62 Examination
Every Monday and Friday are examination days. On Friday women are examined for sexually transmitted disease ….

Gambar 2. 2 Regulasi Penggunaan *Comfort Stations*

Sumber: Website Asian Women Funds (AWF)

Dalam Gambar 2. menunjukkan bahwa militer Jepang membuat regulasi khusus untuk mengatur sistem ini beroperasi. Meskipun bertolak belakang dengan kondisi faktual, regulasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengatur cara *Comfort Stations* bekerja, siapa yang dapat menggunakannya, dan memberikan

perlindungan kepada perempuan yang bekerja di sana. Berdasarkan ilustrasi, regulasi tersebut mencakup:

1. Penetapan Tarif dan Waktu. Tentara biasa dan tentara non-komisi dikenakan biaya lebih rendah daripada perwira dengan biaya lebih tinggi. Tentara diatur oleh regulasi yang mana *Comfort Stations* terbuka untuk militer pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana fasilitas diatur secara strategis untuk memaksimalkan penggunaan oleh tentara.

2. Pemeriksaan Kesehatan. Para perempuan juga diharuskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin dua kali seminggu yang bertujuan memastikan kesehatan dan menghentikan penyebaran penyakit menular di antara tentara. Meksipun demikian, aturan ini sering diabaikan terutama di *Comfort Stations* dalam situasi yang tidak selalu memihak.

3. Eskploitasi dan Kekerasan. Kenyataannya sangat berbeda dari peraturan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa wanita di *Comfort Stations* akan menerima perlindungan. Para wanita seringkali dipaksa bergabung dengan puluhan anggota militer setiap hari dan mengalami kekerasan fisik serta seksual yang parah. Banyak dari mereka harus tetap bekerja meskipun terinfeksi penyakit, dan pelanggaran aturan militer tidak dihukum.

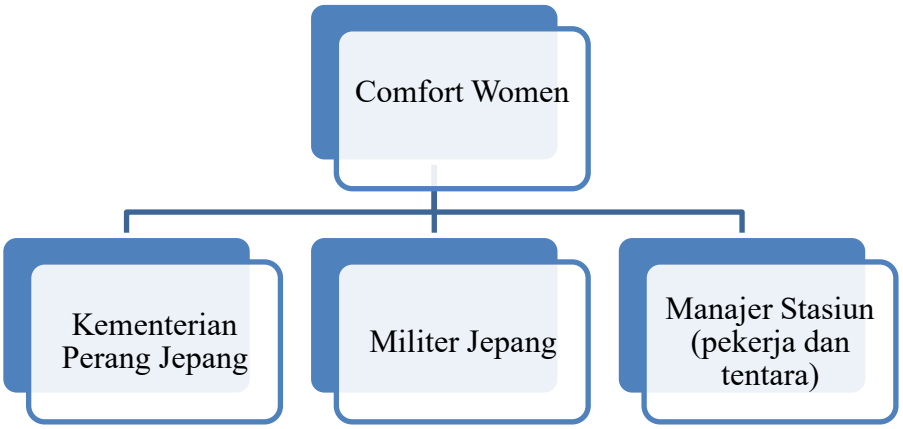

Gambar 2. 3 Bagan Struktur Organisasi dalam Sistem *Comfort Women*

Sumber: Associaton for Asian Studies

Pada bagan di atas, terdapat penjelasan bahwa sistem *Comfort Women* dilaksanakan oleh beberapa substansi yang bertujuan menjalankan kelancaran adanya *Comfort Stations*. Secara garis besar setiap level aktor saling berkaitan dengan aktor lain dalam pengelolaan sistem *Comfort Women*. Kementerian Perang Jepang dalam catatan harian Okabe Naozaburo, mengatur pemindahan dan penugasan wanita-wanita *Comfort Women* ke berbagai lokasi atas instruksi oleh aktor utama (Kaisar Jepang), yang memiliki peran untuk memberikan perintah kepada seluruh aktivitas militer dan bertanggung jawab atas pendirian *Comfort Stations*.[41] Selanjutnya ialah Militer Jepang yang berkewajiban atas pengoperasian fasilitas *Comfort Stations* setiap hari. Dalam hal ini, Militer Jepang memiliki sub-tugas untuk monitoring keadaan para wanita, penuntutan dalam memberikan layanan kepada tentara, serta pemeriksaan kesehatan. Meskipun dalam kenyataannya, sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, mereka juga bertanggung jawab untuk menerapkan regulasi militer. Para tentara Jepang di tingkat paling bawah sebagai pengguna fasilitas *Comfort Stations*, berhubungan langsung dengan para wanita (korban) dan melakukan kekerasan juga penyalahgunaan kekuasaan.

Tanaka menyatakan bahwa ketika satu kelompok ras dijajah oleh negara lain atau disubordinasikan oleh kelompok lain, laki-laki dari kelompok dominan sering kali melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan.[42] Selama perang, kekerasan seksual terhadap perempuan digunakan sebagai alat untuk mengambil alih wilayah jajahan dan mempermalukan otoritas negara. Yamashita mengatakan bahwa saat Perang Asia Pasifik dimulai pada tahun 1931, *Comfort Stations* didirikan untuk memenuhi keinginan seksual tentara Jepang.[43] Namun demikian, perbudakan seksual militer ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki reputasi Kekaisaran Jepang. Dengan membatasi pelecehan seksual pada fasilitas yang dikendalikan militer, pemerintah Jepang berharap dapat menghindari

[41] Widiyanti Andri Wijaya, Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas *Comfort Women* pada Masa Pemerintahan Moon Jae-in di Korea Selatan, *Skripsi Sarjana, Universitas Jember,* (2024): 24-30.
[42] Jin Choi, "Paving the Road to Peace: Transnational Solidarity for Survivors of Military Sexual Slavery by Imperial Japan through the Observation of the Wednesday Demonstration," (Master's thesis, York University, 2019): 16–22.
[43] *Ibid.*

kecaman internasional, seperti peristiwa Nanking serta sentimen anti-Jepang dari penduduk lokal di wilayah pendudukan.

Saat Jepang menduduki semenanjung Korea, penculikan perempuan Korea Selatan yang dikenal sebagai *Comfort Women* dimulai. Mereka diculik dengan janji pendidikan dan pekerjaan sebelum diangkut menggunakan mobil tentara Jepang serta kereta api menuju *Comfort Stations* yang tersebar di seluruh negara kependudukan Jepang, tetapi kebanyakan dari mereka dikirim ke China. Setelah *Comfort Stations* dibangun, para tentara Jepang mulai menculik perempuan dari wilayah kolonialnya termasuk Korea Selatan. Sistem ini mengalami ekspansi disebabkan perluasan aktivitas militer Jepang di wilayah Asia-Pasifik. Selain itu, karena perekrutan sukarela tidak lagi memadai, pemerintah Jepang dan agen-agen swasta mulai menggunakan tipu muslihat untuk merekrut gadis-gadis dari daerah koloni dan menempatkannya di *Comfort Stations* dengan janji yang telah direncanakan. *Comfort Women* sebagian besar terdiri dari gadis-gadis yang berusia antara 14 dan 18 tahun, berasal dari daerah pelosok jajahan Jepang. Mayoritas dari mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pedesaan dan tidak memiliki pendidikan formal. Antara 70.000 dan 200.000 *Comfort Women* diperkirakan sebagian besar ialah wanita muda yang belum menikah.[44] Setelah mendirikan *Comfort Stations* di Shanghai, Jepang juga mendirikannya di Indonesia, Thailand, Filipina, Jepang, Korea, dan Taiwan. Menurut penelitian, 80% *Comfort Women* terdiri dari wanita Korea Selatan,[45] sementara sisanya berasal dari negara jajahan Jepang lainnya. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Jepang kehilangan kekuasaan di Korea Selatan pada tahun 1945.

[44] Sigit dan Farin Almira Anantasya, "*Comfort Women*: Impacts on Japan's Relations with South Korea and The Philippines," *Malaysian Journal of International Relations* 9, no. 1 (30 Desember 2021): 145–149, https://doi.org/10.22452/mjir.vol9no1.8.
[45] *Ibid.*

Gambar 2. 4 Perekrutan dan Pengangkutan Korban *Comfort Women*

Sumber: The Korean Council - Women and War

Comfort Stations dibangun dari rumah, peternakan, hotel, atau gedung yang tidak terpakai. Biasanya kamp tersebut memiliki sepuluh barak di setiap bangunan yang diawasi setidaknya satu orang. Tiap barak memiliki sepuluh kamar ukuran kecil dengan futon (perangkat tidur Jepang tradisional yang tergeletak diatas lantai atau tanpa dipan). Korban *Comfort Women* yang tiba di *Comfort Stations* akan diberi nama khusus menggunakan nama Jepang yang dibuat oleh kepengurusan kamp dan nomor untuk dipanggil. Para korban diperiksa seminggu sekali untuk mengetahui penyakit kelamin menular dan harus melayani tentara

Jepang dua puluh hingga tiga puluh kali sehari, yang menyebabkan memar serta infeksi pada bagian kelamin korban.[46]

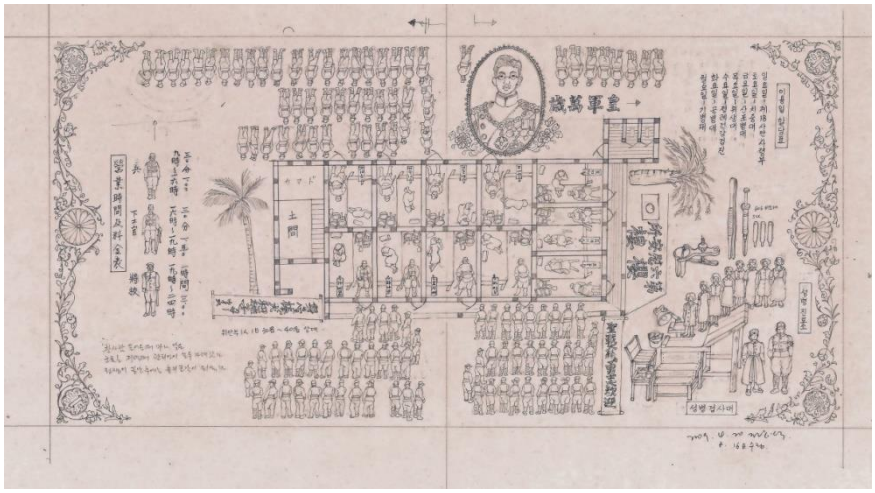

Gambar 2. 5 Ilustrasi Tentara Jepang Menunggu Giliran di *Comfort Stations*

Sumber: The After Monument

2.1.2 Pengalaman dan Dampak yang Dialami Korban *Comfort Women*

Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kejahatan Perang Internasional untuk Perempuan (*United Nations Commission on Human Rights and the Women's International War Crimes Tribunal*) mengakui sistem *Comfort Women* ini sebagai perbudakan seksual militer yang telah merusak jiwa dan raga para korban.[47] Selama perang, tentara Jepang melanggar hak-hak wanita penghibur, yang merupakan kejahatan terbesar terhadap perempuan. Pelanggaran ini melibatkan perbudakan seksual dengan memaksa para wanita dan menjadikan alat untuk menerapkan ideologi serta sistem penindasan berbasis gender. Keadaan korban *Comfort Women* di rumah bordil militer pun sangat memprihatinkan, dimana para perempuan tinggal di ruangan kecil dengan sekat tipis dari tenda bambu atau papan kayu, sehingga tidak memberikan kenyamanan ataupun privasi. Dokter militer juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tetapi hanya

[46] Zahra Ramadhani Fitria dan Harmonis, "DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU *COMFORT WOMEN* PADA ERA MOON JAE-IN," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no.2 (2024): 107-117.
[47] Wenjie Li, "FEMINIST FRAMING OF *COMFORT WOMEN* IN NEWS MEDIA," (Master's thesis, Södertörn Univesity, 2021): 5–43.

untuk memastikan bahwa para korban tetap dapat melayani, bukan untuk kesehatan mereka sendiri.[48]

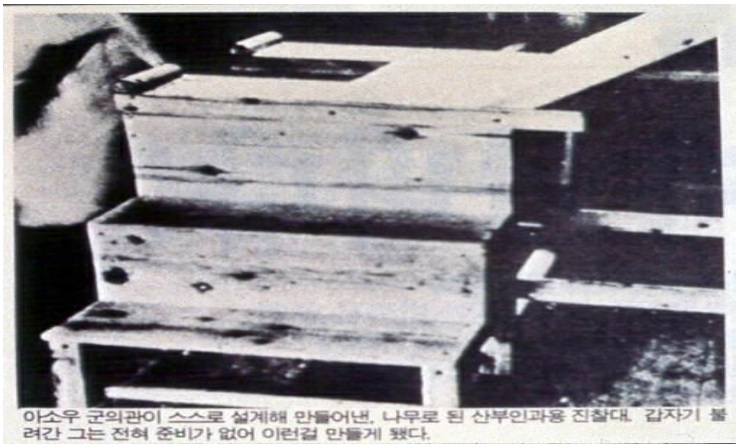

Gambar 2. 6 Meja Pemeriksaan *Veneral Diseases*

Sumber: Museum of Social Justice

Kesaksian mantan *Comfort Women* Korea yang bernama Park Cha Sun menceritakan bagaimana para korban diperlakukan di *Comfort Stations*. Ia menyatakan bahwa: "Sekitar bulan Juli, di Hanko, tempat tinggal orang Jepang, masyarakat Korea dan Jepang ditahan bersama. Kami semua terkunci di bawah banyak pintu. Tidak ada yang bisa keluar begitu mereka terkunci di dalam. Dengan penjaga di pintu masuk, kami berdiri menghadap tembok. Mereka akan memukuli anda sampai mati jika mencoba melarikan diri. Mereka tidak terlalu terburu-buru untuk bermain-main dengan wanita lain, sebaliknya, mereka datang satu demi satu".[49] *Comfort Stations* melegitimasi pemerkosaan massal dengan alasan "pengaturan". Jika para perempuan sakit, mabuk, atau tidak mau melayani, catatan akan dibuat sebagai penyakit atau pelanggaran, yang kemudian menyebabkan korban dapat menghadapi hukuman, dipukul atau bahkan dibunuh. Mereka ditempatkan dalam sistem yang diatur dan diawasi langsung oleh militer Jepang, menunjukkan pelanggaran HAM yang sistematis.

[48] "Military doctors regularly examined women for *Veneral Diseases*, but other diseases were not treated," dalam *Comfort Women Then and Now: Who They Were and Why We Should Remember Them*, *Museum of Social Justice*, https://www.museumofsocialjustice.org/comfort-women-then-and-now-who-they-were-and-why-we-should-remember-them.html.

[49] Park Cha Sun, kesaksian mantan *Comfort Women* Korea Selatan, dalam Yuting Xie dan Emily Kraeck, "An Unforgettable Ordeal: Chinese '*Comfort Women*' in World War II," *Journal of Student Research* 10, no. 3 (28 Oktober 2021): 8–9, https://doi.org/10.47611/jsrhs.v10i3.1798.

Peristiwa yang berulang selama bertahun-tahun ini tentu saja meninggalkan trauma yang parah bagi para korban. Karena tidak sanggup menanggung penderitaan seperti ini, banyak dari mereka memilih untuk bunuh diri menggunakan obat terlarang, misalnya. Mereka mengklaim bahwa mati dengan cara yang terhormat melalui bunuh diri lebih baik daripada hidup di bawah tekanan dan siksaan serta kehilangan harga diri. "Mati yang dihormati lebih baik daripada hidup yang dihina". Setelah perang, banyak perempuan menghadapi stigma, rasa malu, dan trauma yang signifikan, kemudian menyebabkan cacat fisik dan psikologis permanen. Karena latar belakang sebagai *Jugun Ianfu*, atau budak seks militer Jepang, mereka menghadapi kesulitan untuk membangun kembali harga diri dalam kehidupan sosial. Para korban akhirnya mulai berbicara setelah budaya diam menyelimuti selama bertahun-tahun. Namun, bahkan pemerintah sendiri sering mengabaikan suara mereka, yang mana terlalu sibuk dengan pembangunan ekonomi pasca-perang daripada memberikan ruang untuk penyembuhan. Kim Hak Sun, penyintas pertama yang berbicara di depan umum (1991), berkata, "Ketika saya masih muda, saya merasa sangat malu… Makin saya mengenangnya, makin saya marah dan sesak napas." [50]

2.2 Keberadaan Korban *Comfort Women* Era Park Geun-Hye

2.2.1 Isu *Comfort Women* Pasca Perang

Di bawah kepemimpinan Yoshida, Jepang berupaya menormalisasi hubungan dengan Korea Selatan, yang berujung pada penandatanganan *Treaty on Basic Relationship* tahun 1965. Perjanjian ini mencakup kompensasi 800 juta dolar[51] dan kesepakatan kerja sama ekonomi. Meski Korea Selatan awalnya menyambut normalisasi ini, muncul tuntutan untuk mengangkat kembali masalah *Comfort Women* yang belum terselesaikan. Sebelumnya, para korban *Comfort Women* Korea Selatan hidup dengan trauma masa lalu sebagai *Jugun Ianfu*. Baru pada akhir 1980, pemerintah Korea Selatan mulai memberikan penghargaan

[50] Kim Hak-Sun, kesaksian dalam Mi Jin Cho, "Victim Silencing, Sexual Violence Culture, Social Healing: Inherited Collective Trauma of World War II South Korean Military '*Comfort Women*,'" *Auctus: The Journal of Undergraduate Research and Creative Scholarship* (2020): 3–7, https://scholarscompass.vcu.edu/auctus/78.

[51] Fitrah Firdanis Maharasra, "PERAN MASYARAKAT KOREA SELATAN DALAM MEMPENGARUHI UPAYA REKONSILIASI ISU *COMFORT WOMEN* ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,* vol.4, no.1 (2024): 9.

kepada mereka.[52] Momen penting terjadi pada Agustus 1991, ketika tiga mantan *Comfort Women*, termasuk Kim Hak-Sun, berbicara terbuka tentang pengalaman mereka dan menuduh Jepang mengurung wanita Asia di *Comfort Stations*. Tindakan ini memicu gerakan Internasional dan mendorong korban lain untuk bersuara. Tuntutan Kim bersama para korban lainnya berisi:

(1) Mengakui fakta historis pemaksaan perempuan menjadi *Comfort Women* dan meminta maaf,

(2) Melakukan penyelidikan menyeluruh dan mempublikasikan hasilnya,

(3) Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya,

(4) Berbicara fakta tentang *Comfort Women* dan berkomitmen tidak mengulangi kejahatan serupa.

Gambar 2. 7 Kesaksian Kim Hak-Sun, 14 Agustus 1991

Sumber: Museum of Social Justice

Kekecewaan terhadap pemerintah Korea Selatan akan hal ini mendorong terbentuknya gerakan solidaritas oleh masyarakat sipil. Sebanyak 37 kelompok aktivis wanita bersatu membentuk *The Korean Council for The Women Drafted for Sexual Slavery* (*Jeong-Daeh-Yeob*).[53] Kelompok ini memulai aksi unjuk rasa mingguan bernama *Wednesday Demonstration* pada 8 Januari 1992, bersamaan dengan kunjungan PM Jepang Kiichi Miyazawa ke Korea Selatan.[54] Aksi ini terus berlanjut setiap Rabu dan semakin membesar. Komunitas Internasional mendukung tuntutan para korban, dimana pada 6 Februari 1996, PBB mengecam

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid., hlm. 4.*
[54] *Ibid., hlm. 11.*

Jepang atas perbudakan seksual ribuan perempuan[55] selama Perang Dunia II dan menuntut pengakuan tanggung jawab hukum. *Statue of Peace* atau Patung Perdamaian (*Pyeonghwaui Sonyeosang*) pun didirikan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul dan menjadi simbol perjuangan. Patung ini memperingati *Wednesday Demonstration* ke-1000[56] dan menyatakan bahwa penderitaan para korban belum berakhir telah melalui seribu demonstrasi Rabu, karena pemerintah Jepang terus mengabaikan tanggung jawabnya.

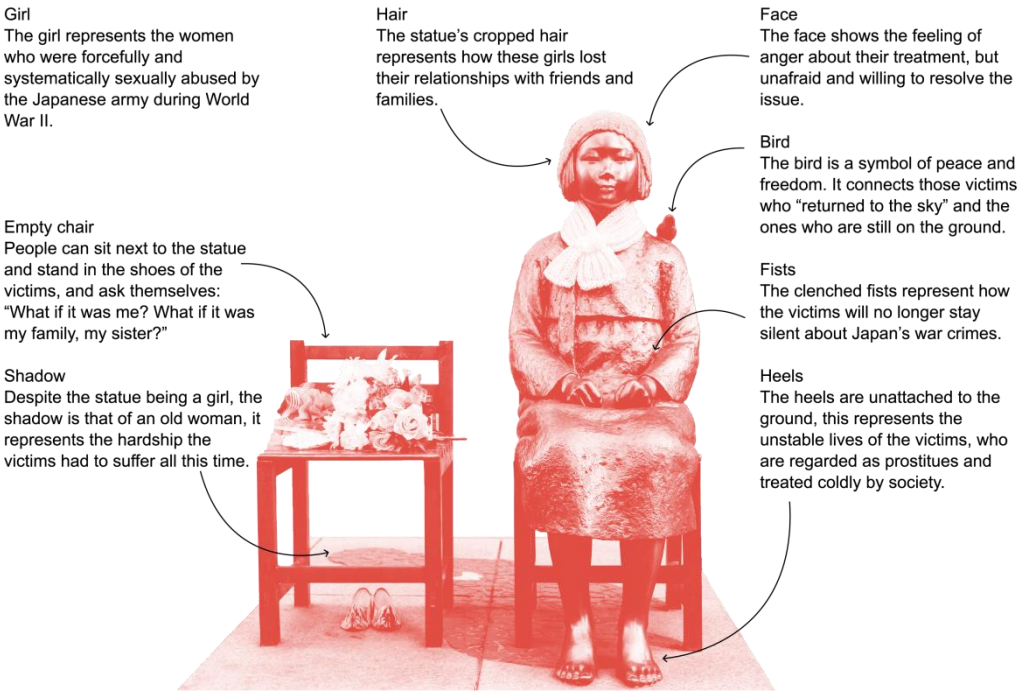

Gambar 2. 8 Annotasi *Statue of Peace*

Sumber: The After Monument

2.2.2 *Comfort Women* Era Park Geun-Hye

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang kembali memburuk ketika Park Geun-hye menjabat sebagai Presiden menggantikan Lee Myung-bak pada tahun 2013. Berbeda dengan pendahulunya, Park mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam upaya penyelesaian masalah *Comfort Women*. Sejak awal masa jabatannya, Park Geun-hye menolak untuk bertemu dengan Perdana Menteri

[55] Dinda Claudia Ayu Eka Putri, "Penolakan Korban *Comfort Women* System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK *Agreement* On *Comfort Women*," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional,* vol.7, no.3 (Desember 2018): 78.
[56] Maharasra, *op.cit., hlm. 12.*

Jepang Shinzo Abe, menciptakan sejarah baru dalam hubungan kedua negara karena untuk pertama kalinya sejak pemilihan presiden baru, tidak ada petemuan langsung yang terjadi antara pemimpin kedua negara. Sikap ini sangat kontras dengan pendekatan Park terhadap negara lain, karena dalam sembilan bulan pertama masa jabatannya, ia telah mengadakan pertemuan dengan Amerika Serikat, China, Rusia, dan beberapa negara Uni Eropa.

Park Geun-hye secara terbuka menyatakan kepada BBC bahwa pertemuan bilateral akan sia-sia jika Jepang tidak meminta maaf secara resmi[57] atas kejahatan yang dilakukan pemerintah kolonial Jepang terkait masalah *Comfort Women*. Ia memahami betapa mendesaknya penyelesaian masalah ini, mengingat dari total 237 korban yang teridentifikasi, hanya 56 orang yang masih hidup saat itu.[58] Meskipun bersikap tegas, Park terus mempertahankan sikap moderat terhadap pemerintahan Jepang. Kemudian pada tanggal 16 April 2014, kedua negara memulai proses konsultasi dengan melakukan dua belas putaran pembicaraan tingkat Direktur Jendral[59] untuk membahas masalah ini. Selama proses ini, Perdana Menteri Abe menolak untuk merevisi pernyataan terkait isu *Comfort Women* pada Maret 2014, meskipun Jepang sudah pernah meminta maaf kepada Korea Selatan pada tahun 1993.[60] Negosiasi berkelanjutan ini akhirnya menghasilkan pertemuan bilateral pertama antara Korea Selatan dan Jepang selama pemerintahan Park Geun-hye pada November 2015. Proses negosiasi mencapai puncaknya dengan penandatanganan *Comfort Women Agreement* yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2015.[61] Rekonsiliasi bilateral ini diumumkan bersama oleh Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se. Perjanjian tersebut memuat beberapa poin penting yang disampaikan oleh kedua belah pihak, yaitu:

---

[57] Park Geun-hye menyatakan bahwa "a summit between the neighboring countries would be pointless…." dalam *Park Geun-hye: Japan Summit 'Pointless' Without Apology, The Diplomat,* 22 November 2013, https://thediplomat.com/2013/11/park-geun-hye-japan-summit-pointless-without-apology/.

[58] Maria Aurelia Primastuti Puspasari dan Hermini Susiatiningsih, "Jalan Terjal Implementasi *Reconciliation and Healing Foundation* oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang," *Jurnal Hubungan Internasional,* vol. 17, no.1 (2021): 102.

[59] *Ibid., hlm. 98.*

[60] *Ibid.*

[61] *Ibid., hlm. 103.*

A. Pokok-pokok pernyataan Menteri Luar Negeri Jepang (Fumio Kishida).

1) Pengakuan Tanggung Jawab: Pemerintah Jepang mengakui tanggung jawab atas masalah *Comfort Women* yang melibatkan otoritas militer Jepang, dan Perdana Menteri Abe menyampaikan permohonan maaf,

2) Bantuan Finansial: Jepang berkomitmen menyediakan dana sebesar 1 miliar yen untuk mendukung lembaga yang akan dibentuk oleh Korea Selatan guna mengobati luka psikologis para korban.

3) Klausul "*Final and Irreversible*": Pemerintah Jepang menegaskan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara final dan tidak dapat diubah lagi, dengan catatan bahwa Jepang akan menerapkan pernyataan sebelumnya, dan kedua belah pihak tidak akan saling menuduh atau mengkritik terkait masalah ini dalam komunitas Internasional, termasuk di forum PBB.

B. Pokok-pokok pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Yun Byung-se).

1) Konfirmasi Penyelesaian: Pemerintah Korea Selatan menghargai upaya Pemerintah Jepang terkait *Comfort Women* dan mengonfirmasi bahwa masalah ini telah diselesaikan secara final dan permanen, dengan catatan Jepang mengimplementasikan poin-poin yang telah diajukan.

2) Penanganan Patung *Comfort Women*: Korea Selatan berkomitmen akan menyelesaikan masalah patung yang didirikan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul dengan berkonsultasi bersama organisasi-organisasi terkait.

3) Komitmen Non-Kritik: Kedua pemerintah sepakat untuk tidak saling menuduh atau mengkritik satu sama lain di lingkungan Internasional, termasuk di forum PBB, terkait masalah *Comfort Women*.

Sebagai implementasi perjanjian, proses pembentukan *Reconciliation and Healing Foundation* dimulai setelah pertemuan asosiasi kementerian terkait tanggal 30 Desember 2015. Pada 6 Januari 2016, Presiden Park menginstruksikan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga untuk memulai proses pendirian yayasan. *Public-Private Task Force* (TF) dibentuk pada 29 Januari 2016 dan

beroperasi dari Maret hingga April 2016 untuk mempersiapkan pembentukan yayasan. Komite yayasan dibentuk pada Mei 2016, dan yayasan tersebut resmi didirikan pada 28 Juli 2016.

Visi utama dari *Reconciliation and Healing Foundation* adalah mengembalikan kehormatan dan martabat para perempuan korban *Comfort Women* militer Jepang, serta menyembuhkan luka psikologis yang mereka alami. Yayasan ini membagi kegiatannya menjadi dua proyek utama. Pertama, Proyek Individu yang berfokus pada pemberian kompensasi pribadi dari Jepang kepada para korban secara langsung. Kedua, Proyek untuk semua korban yang meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk seluruh kelompok korban secara kolektif. Periode pendaftaran bagi korban *Comfort Women* yang ingin menerima dana dibuka dari 10 Oktober 2016 hingga 30 Juni 2017.[62] Dana yang dialokasikan berasal dari kontribusi pemerintah Jepang, dengan pembagian 100 juta won untuk korban yang masih hidup dan 20 juta won untuk keluarga korban yang telah meninggal dunia.[63] Dari total 34 korban *Comfort Women* yang berhasil mengisi formulir donasi, 7 orang mampu menulis formulir mereka sendiri secara mandiri, 13 orang menulis secara langsung namun membutuhkan bantuan, 10 orang memerlukan bantuan penuh, dan 4 formulir diisi oleh anggota keluarga[64] dari korban yang telah meninggal dunia.

Meskipun *Comfort Women Agreement* tahun 2015 dan pembentukan *Reconciliation and Healing Foundation* merupakan pencapaian signifikan, implementasinya menghadapi berbagai hambatan dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat Korea Selatan. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Realmeter beberapa hari setelah pengumuman kesepakatan, sebanyak 50,7 persen responden menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap perjanjian tersebut.[65] Dua hari setelah perjanjian ini dicapai, para korban bersama *Korean Council for*

---

[62] Widiyanti Andri Wijaya, *"Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan"* (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2024): 41.
[63] *Ibid.*
[64] Puspasari, *op.cit., hlm. 105.*
[65] Terrence Matsuo menyatakan bahwa "Realmeter found that 50.7% of respondents disapproved….." dalam *The Comfort Women Agreement 5 Years On, The Peninsula, Korea Economic Institute of America (KEI),* 8 Desember 2020, https://keia.org/the-peninsula/the-comfort-women-*Agreement*-5-years-on/.

Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (KCWS) melakukan *Wednesday Demonstration* ke-1211 sebagai bentuk protes. Para penyintas *Comfort Women* juga mengkritik kesepakatan tersebut karena dianggap lebih mengutamakan kompensasi finansial daripada permintaan maaf yang lebih tulus dari Jepang. Salah satu penyintas, Lee Yong-soo, menyatakan kepada *The New York Times*, "Kami tidak menginginkan uang. Yang kami tuntut adalah Jepang memberikan ganti rugi resmi atas kejahatan yang telah dilakukannya."[66]

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penolakan terhadap yayasan ini adalah sikap pemerintah Jepang yang tetap enggan mengakui bahwa masalah *Comfort Women* melibatkan unsur pemaksaan. Bahkan setelah kesepakatan 2015, pemerintah Jepang secara terbuka menentang narasi perekrutan paksa *Comfort Women* oleh tentara Jepang di berbagai forum internasional. Situasi ini semakin diperburuk oleh turbulensi politik dalam negeri Korea Selatan yang berujung pada pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada Maret 2017. Sebagai dampak dari berbagai tekanan dan kontroversi, pada pertengahan Juli 2017, Kim Tae-hyeon selaku kepala *Reconciliation and Healing Foundation* menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri.[67] Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan kemudian membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan mengaudit operasional yayasan tersebut.

Alasan utama yang memicu ketidakpuasan publik adalah bahwa pemerintahan Park Geun-hye tidak melibatkan atau meminta pendapat para korban *Comfort Women* sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Warga Korea Selatan terus mempertanyakan kredibilitas Jepang, karena banyak yang menilai bahwa kesepakatan tersebut hanya menguntungkan Presiden Park Geun-hye dengan mengorbankan martabat para penyintas demi keuntungan geopolitik dan diplomatik jangka pendek. Persepsi ini semakin diperkuat ketika Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa dia tidak berencana menulis surat permohonan maaf kepada mantan *Comfort Women*. Perjanjian 2015 pada akhirnya tidak memuaskan siapapun. Sebagian besar waga Korea Selatan menganggap perjanjian itu sebagai bentuk pengkhianatan oleh Presiden Park Geun-hye, sementara banyak

[66] *Ibid.*
[67] Puspasari, *op.cit., hlm. 106.*

warga Jepang sayap kanan menganggap perjanjian tersebut tidak perlu. Inti permasalahan dari penolakan para korban adalah bahwa perjanjian tersebut tidak mencerminkan keinginan mereka untuk mendapatkan hukuman yang tegas bagi pihak yang bertanggung jawab, tidak hanya sekadar permitaan maaf dan pengakuan. Kesepakatan ini dipandang sebagai "tamparan di wajah" bagi para korban yang selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan.

2.3 Keberadaan Korban *Comfort Women* Era Moon Jae-In

Pergeseran kepemimpinan dari Presiden Park Geun-hye ke Moon Jae-in mencerminkan perubahan pendekatan mengenai masalah *Comfort Women* di Korea Selatan. Moon Jae-in, yang menjadi presiden pertama dengan perspektif liberal setelah sembilan tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Kebebasan Korea (sebelumnya dikenal sebagaia Partai Saenuri dan Hannara),[68] mengadopsi sikap yang lebih tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Latar belakangnya sebagai ahli hukum dan pengacara hak asasi membentuk pendekatannya yang berorientasi pada hak korban. Presiden Moon membentuk Gugus Tugas Khusus di Kementerian Luar Negeri pada Mei 2017 untuk mengevaluasi Perjanjian 2015 antara Korea Selatan dan Jepang. Laporan yang dirilis pada Desember 2017 mengkritik perjanjian tersebut karena memberikan terlalu banyak konsesi kepada Jepang dan tidak melibatkan para penyintas dalam proses negosiasi. Moon menegaskan perjanjian tersebut tidak memenuhi keinginan para korban dan masyarakat Korea Selatan, meski tidak secara resmi membatalkannya.

Moon menetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari peringatan nasional[69] bagi wanita penyintas *Comfort Women*, bertepatan dengan hari pembebasan Korea dari penjajahan Jepang (1945). Pada peringatan pertama di tahun 2018, Moon menyatakan masalah ini hanya akan terselesaikan "hanya jika dunia, termasuk kita dan Jepang, benar-benar merenungkan kekerasan seksual terhadap semua

[68] Arizki Putri Candelaria, "Konstruksi Predominant Leader dalam Kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *Comfort Women* pada Tahun 2017-2022," *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies,* vol. 5, ed. 2 (Juli-Desember 2023): 31.
[69] Carol Gluck, "What the World Owes the *Comfort Women*," dalam Jie-Hyun Lim dan Eve Rosenhaft, ed., *Mnemonic Solidarity: Global Interventions*, Entangled Memories in the Global South (Cham: Palgrave Macmillan, 2021): 73–104, https://doi.org/10.1007/978-3-030-57669-1.

perempuan."[70] Ia juga mengundang para korban ke Gedung Biru (istana kepresidenan) untuk meminta maaf secara resmi atas tindakan pemerintahan sebelumnya yang tidak melibatkan mereka dalam negosiasi perjanjian 2015. Representasi dan penghormatan para penyintas meningkat secara signifikan selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in, melalui pendirian berbagai patung dan monumen peringatan. Museum Perdamaian *Comfort Women* di Korea Selatan (*Jeonjaeng-gwa Yeoja In-gwon Bangmulgan*) juga diperbarui selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in,[71] untuk menceritakan sejarah dan pengalaman para korban menampilkan replika ruangan bawah tanah yang mirip dengan ruangan di dalam rumah bordil serta rekaman suara yang mengalunkan kisah para penyintas.

Pada era Moon Jae-in, tersisa 37 korban selamat Korea yang masih hidup, salah satunya Lee Ok-sun yang telah berusia 90 tahun.[72] Lee kembali ke Korea Selatan pada 1996 setelah tinggal di Tiongkok dan Jepang selama lima puluh tahun. Ia mulai berbicara tentang pengalamannya terdorong oleh meningkatnya perhatian publik terhadap isu *Comfort Women* pada awal 1990-an. Dalam sebuah wawancara, Lee menyatakan, "Kami diambil ketika berusia 15 atau 16 tahun. Sekarang kami berusia 80-an, 90-an, hampir 100 tahun, tetapi masih belum ada permintaan maaf dari Jepang."[73] Didirikannya *House of Sharing* pada 1992 (rumah sakit pertama untuk mantan *Comfort Women* yang sudah lanjut usia), memberikan dukungan bagi para penyintas seperti Lee.

Korean Council memainkan peran penting dalam advokasi para korban dengan melakukan kampanye untuk hak-hak dan perjuangan mereka. Setelah perjanjian 2015, organisasi ini menginisiasi "Kampanye Penggalangan Dana Sejuta Warga Negara untuk Pembatalan Perjanjian Jepang-Korea Selatan" karena

---

[70] *Ibid.*
[71] Widiyanti Andri Wijaya, *"Upaya Pemenuhan Hak Para Penyintas Comfort Women Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In di Korea Selatan* (Skripsi Sarjana, Universitas Jember, 2024): 50.
[72] Grace Banks, "*South Korea: New Generation Joins 'Comfort Women' Fight," Al-Jazeera,* 28 September 2017, https://www.aljazeera.com/features/2017/9/28/south-korea-new-generation-joins-comfort-women-fight.
[73] Lee Ok-Sun menyatakan, " We were taken away when we were 15 or 16. We are now in…," dalam TS-2. Hak-sun Kim, a Korean Survivor…., *Comfort Women Speak Up, Comfort Women Resource Center*, diunggah oleh Korea Center for Investigate Journalism, https://international.ucla.edu/cks/care/comfortwomen_speakup/267562.

menganggap perjanjian tersebut tidak memberikan pengakuan internasional atas kolonialisme dan kekerasan negara. *Wednesday Demonstration* tetap menjadi simbol utama perjuangan para penyintas, bahkan selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Dimulai pada 8 Januari 1992, demonstrasi ini diadakan setiap Rabu di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, mencapai tonggak sejarah dengan demonstrasi ke 1.500 pada 2021. Tujuan utamanya adalah menuntut permintaan maaf resmi dan kompensasi hukum dari pemerintah Jepang.

Presiden Moon mengintegrasikan sejarah *Comfort Women* ke dalam pendidikan nasional melalui:

1. Perbaikan buku teks sejarah dan sosial yang mencakup sejarah *Comfort Women* dan dampaknya pada peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, terutama terkait korban pemerkosaan perempuan.

2. Penambahan materi tentang sejarah *Comfort Women* ke dalam ensiklopedia dan artikel.

3. Pengembangan mata pelajaran tentang kekerasan seksual dan HAM.

4. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan museum untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran siswa tentang hak asasi manusia.

Pengelolaan dana penyintas menjadi sorotan publik selama era Moon Jae-in. Yayasan Rekonsiliasi dan Penyembuhan yang mendistribusikan dana kompensasi dari Jepang menghadapi kritik keras hingga akhirnya dibubarkan pada 27 November 2018.[74] Moon menggantikan seluruh dana dari Jepang dengan dana pemerintah Korea Selatan. *Korean Council for Justice and Remembrance* juga menghadapi krisis kepercayaan setelah skandal yang melibatkan mantan ketuanya, Yoon Mi-hyang, yang didakwa atas tuduhan penipuan dan penggelapan dana.[75] Meski demikian, organisasi ini terus melakukan advokasi dan edukasi dengan berupaya meningkatkan transparansi dan pelibatan pemangku kepentingan.

---

[74] Candelaria, *op.cit., hlm. 39.*
[75] Yi Whan-woo, "Corruption allegations may tarnish 30 years of '*Comfort Women*' movement," *The Korea Times,* 31 Mei 2020, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/01/113_290372.html

Dalam ranah diplomatik, pemerintahan Moon menggunakan pendekatan multilateral untuk mendapatkan dukungan internasional. Inisiatif signifikan termasuk upaya pendaftaran dokumen perbudakan seksual ke dalam program UNESCO "*Memory of the World*", meski akhirnya ditunda karena resistensi pemerintah Jepang.[76] Moon juga berusaha membangun pusat studi *Comfort Women* di Kementerian Keadilan yang mendapat sambutan positif dari Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres.[77] Ketidaksepakatan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai tanggung jawab historis terus menyebabkan ketegangan diplomatik. Namun, pemerintahan Moon tetap berupaya mengurangi ketegangan sambil fokus meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi para korban, mencerminkan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap penderitaan para wanita tersebut.

Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae-in menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap isu *Comfort Women* dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Fokus utamanya mencakup keadilan bagi para korban, peningkatan kesadaran masyarakat, dan diplomasi multilateral yang lebih tegas terhadap Jepang. Meskipun belum semua tujuan tercapai, langkah-langkah yang diambil telah memberikan kontribusi penting dalam perjuangan para penyintas *Comfort Women* untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan. Dengan memobilisasi dukungan dari masyarakat internasional, Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae-in menunjukkan komitmennya pada penyelesaian isu *Comfort Women* yang berkeadilan. Meskipun tantangan yang dihadapi tetap besar, upaya terus dilakukan untuk membuka babak baru dalam hubungan dengan Jepang demi stabilitas dan keamanan di Asia Timur.

[76] *Ibid., hlm. 38.*
[77] *"We welcome efforts by member states to promote eduaction, truth-telling and memorialization…."* António Gutteres, UN Secretary-General (UN Press Release, 2020).

Tabel 2. 2 Jumlah Penyintas yang Masih Hidup (2015-2022)

Tahun	Jumlah Survivors	Perubahan	Sumber Utama	Keterangan
2015	~46–50*	-	Estimasi berdasarkan tren	Tahun Perjanjian Korea–Jepang
2016	~42–45*	↓ 4–5	Estimasi berdasarkan tren	Periode akhir era Park Geun-hye
2017	37	↓ 5–8	Al Jazeera, Sept 2017	Awal era Moon Jae-in
2018	25	↓ 12	Reuters, Des 2018	Penurunan signifikan
2019	23	↓ 2	Al Jazeera, Jan 2019	Meninggal: Kim dan Lee
2020	~18–20*	↓ 3–5	Estimasi berdasarkan tren	Data tidak tersedia
2021	14	↓ 4–6	Reuters, Juli 2021	Hampir separuh dari 2018
2022	~10–12*	↓ 2–4	Estimasi	Kim Yang-Ju (penyintas) meninggal Mei 2022

*Catatan: Angka estimasi berdasarkan tren penurunan tahunan, data diolah oleh penulis.

BAB III
KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* PADA MASA KEPEMIMPINAN MOON JAE-IN

Terpilihnya Moon Jae-in sebagai Presiden Korea Selatan pada Mei 2017 menandai pergeseran besar dalam penanganan masalah *Comfort Women*. Dibandingkan dengan pendahulunya Park Geun-hye, kebijakan Moon terhadap warisan kolonial Jepang ini lebih peka terhadap aspirasi para korban. Dengan latar belakang sebagai pengacara dan aktivis hak asasi manusia, Moon membawa perspektif yang menekankan keadilan restoratif bagi para penyintas. Selama pemerintahanya (2017-2022), kebijakan terkait *Comfort Women* mengalami perubahan sifgnifikan, dimulai dengan evaluasi *Comfort Women Agreement* 2015 (*Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015*), yakni kesepakatan bilateral antara Presiden Park Geun-hye dan Perdana Menteri Shinzo Abe yang menyatakan penyelesaian isu *Comfort Women* bersifat '*Final and Irreversible*'. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memprioritaskan keadilan dan pemulihan hak para korban, didorong oleh tekanan domestik dan keyakinan bahwa kesepakatan 2015 belum memenuhi aspirasi para korban.

Bab ini menganalisis dua aspek utama kebijakan *Comfort Women* di bawah pemerintahan Moon Jae-in, yaitu peninjauan kembali *Comfort Women Agreement* 2015 dan upaya pemenuhan advokasi para korban. Aspek pertama mencakup pembentukan komite evaluasi independen, hasil peninjauan, dan konsekuensi diplomatik dari keputusan meninjau kesepakatan yang sebelumnya dinyatakan "*Final and Irreversible*". Aspek kedua meliputi pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation*, inisiatif memorial, dukungan kesejahteraan, dan upaya diplomatik untuk mendorong pengakuan serta kompensasi lebih substansial dari Jepang. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi keunikan pendekatan Moon Jae-in, mengevaluasi efektivitas kebijakannya dalam konteks hubungan Korea Selatan-Jepang, serta menilai penanganan dilema antara mempertahankan hubungan diplomatik dan tuntutan keadilan historis. Dengan mempertimbangkan perubahan politik domestik dan internasional, penelitian ini

berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang penyelesaian isu-isu historis sensitif dan implikasinya terhadap hubungan diplomatik serta keadilan bagi para korban.

3.1 Adanya Peninjauan Ulang Kebijakan *Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015*

Berawal dari kritik yang tajam terhadap perjanjian *Comfort Women* selama masa kampanye presidensialnya, pemerintahan Moon Jae-in memutuskan untuk meninjau ulang *Comfort Women Agreement* 2015. Kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan Park Geun-hye pada 28 Desember 2015 mendapat penolakan luas dari banyak orang di Korea Selatan, terutama dari kelompok yang mendukung korban *Comfort Women*. Moon Jae-in menyebut kesepakatan tersebut sebagai "tidak dapat diterima oleh rakyat Korea" dan "bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penyelesaian isu hak asasi manusia" saat berkampanye untuk presiden 2017.[78] Peninjauan ulang didorong oleh tekanan dari kelompok advokasi seperti *Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan* (sebelumnya dikenal sebagai *Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*). Kesepakatan 2015 selalu dikritik oleh organisasi ini karena tidak mengakui tanggung jawab hukum Jepang dan tidak memberikan kompensasi yang memadai. *Wednesday Demonstration*, yang telah berlangsung setiap rabu (protes mingguan) sejak 1992, terus menjadi tanda penolakan terhadap kesepakatan tersebut dan mendorong pemerintahan baru untuk mengambil sikap yang lebih tegas.

Untuk memulai langkah konkret pertama dalam memenuhi janji kampanye tersebut, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha di bawah kepemimpinan Moon Jae-in, mengumumkan pada Juni 2017 bahwa akan ada tim evaluasi yang meninjau proses negosiasi kesepakatan 2015. Sehingga, pada tanggal 31 Juli 2017, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan secara resmi membentuk Komite Evaluasi Independen[79] (*Task Force on the Review of the*

[78] Reuters, *South Korea says 'Comfort Women' deal flawed, but Japan warns against change,* December 27, 2017, South Korea says '*Comfort Women*' deal flawed, but Japan warns against change | Reuters

[79] Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea. *Taskforce Launched to Review Agreement on "Comfort Women" Issue Reached between Goverments of ROK and Japan on 28 December, 2015.*

Korea-Japan Agreement on the Issue of "*Comfort Women*" *Victims*) untuk meninjau proses negosiasi *Comfort Women Agreement* 2015. Komite ini memiliki sembilan anggota dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, diplomat, praktisi hukum, dan anggota organisasi hak asasi manusia.[80] Prof. Oh Tai-Kyu dari Universitas Nasional Seoul ditunjuk sebagai ketua komite,[81] yang memberikan kredibilitas akademik untuk proses evaluasi. Struktur komite dimaksudkan untuk menjaga independensi dan memiliki tugas yang jelas untuk memeriksa seluruh proses negosiasi kesepakatan 2015, termasuk pertemuan rahasia dan komunikasi informal antara pejabat Korea Selatan dan Jepang. Secara hukum penting untuk menentukan apakah perjanjian tersebut merupakan perlindungan diplomatik yang tepat dan efektif bagi mantan wanita *Comfort Women* di antara objek penilaian, substansi, dan struktur perjanjian, serta resolusi yang berpusat pada korban. Komite Evaluasi menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan konsultasi publik, wawancara mendalam, dan penelitian arsip. Salah satu aspek penting dari metodologi komite adalah penekanan pada keterlibatan korban dalam proses evaluasi, dengan menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan para wanita penyintas dan kelompok pendukung, seperti *Korean Council for Justice and Remembrance*. Para korban memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kesepakatan 2015 dan menyampaikan keberatan. Komite mengadakan konferensi pers secara berkala dan mempublikasikan laporan kemajuan untuk memastikan transparansi, serta menyediakan platform online bagi masyarakat Korea Selatan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang kesepakatan tersebut.

Laporan satuan tugas yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017 mengecam proses pembuatan perjanjian.[82] Laporan ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut menggambarkan pemerintah daripada korban. Untuk mencapai kesepakatan, konsultasi dilakukan secara tertutup dan tidak menggunakan proses demokratis seperti sidang terbuka di mana para korban dapat menyuarakan

---

December 27, 2017. Taskforce Launched to Review *Agreement* on "*Comfort Women*" Issue Reached between Governments of ROK and Japan on 28 December, 2015 View|Press Releases | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea

[80] *Ibid.*

[81] *Ibid.*

[82] *Ibid.*

pendapat mereka. Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri saat itu tidak mengungkapkan beberapa bagian dari proses negosiasi kepada publik dalam konferensi pers bersama, termasuk kesepakatan internal untuk menghindari menggunakan istilah "perbudakan seksual" ketika berbicara tentang sistem *Comfort Women* di masa mendatang.

Pertama-tama, satuan tugas menemukan beberapa masalah signifikan dalam unsur-unsur perjanjian yang diungkapkan kepada publik, sebagai berikut:

1. Mengenai pengakuan tanggung jawab, kata-kata yang digunakan Jepang hanya menyatakan bahwa mereka "dengan berat hati mengakui tanggung jawabnya". Pengkuan ini hanya mencakup tanggung jawab moral dan bukan tanggung jawab hukum, suatu hal yang tidak dapat diterima masyarakat Korea.

2. Pemerintah Jepang tidak melakukan permintaan maaf dalam bentuk resolusi kabinet yang tidak dapat dibatalkan dan memiliki formalitas lebih tinggi, bahkan setelah isi perjanjian diumumkan kepada publik.

3. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa dana yang diberikan kepada *Reconciliation and Healing Foundation* bukanlah ganti rugi berdasarkan tanggung jawab hukum, suatu pernyataan yang ditolak oleh aktivis dan korban.

4. Setelah diumumkan, perjanjian tersebut menjadi sangat kontroversial di Korea karena penggunaan frase "*Final and Irreversible*".

Kedua, Satuan tugas menyesalkan fakta bahwa terdapat beberapa elemen perjanjian yang tidak diungkapkan kepada publik namun telah disepakati oleh kedua negara. Elemen-elemen rahasia ini mencakup hal-hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Korea, termasuk permintaan Jepang agar kelompok penekan seperti *Korean Council* tidak berbicara di forum internasional, tindakan mengenai patung peringatan di depan Kedutaan Besar Jepang di Korea dan negara lain, serta permintaan agar penggunaan istilah "perbudakan seksual" dihentikan[83] dalam diskursus resmi. Ketiga, satuan tugas juga menyesalkan bahwa perjanjian tersebut pada dasarnya adalah perjanjian politik, bukan kesepakatan hukum formal. Pada

[83] Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, *op.cit.,* section "undisclosed elements of the *Agreement*."

pertemuan menteri luar negeri, pemerintah kedua negara hanya secara lisan mengonfirmasi isi perjanjian dan mengumumkannya pada konferensi pers bersama setelahnya. Pengumuman tersebut kemudian dipublikasikan secara terpisah oleh masing-masing pihak di situs web resmi mereka dengan perbedaan dalam penyuntingan kata tertentu, yang menimbulkan kecurigaan dan kontroversi mengenai apa yang sebenarnya telah disepakati. Karena perjanjian tersebut tidak tertulis dan bersifat informal, kekuatan hukum internasionalnya menjadi tidak pasti dan dipertanyakan.[84]

Pemerintahan Moon Jae-in membuat pendekatan "*two-track*" untuk menangani masalah *Comfort Women*. Pendekatan ini secara strategis memisahkan masalah sejarah dan keadilan bagi korban dari kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Jepang. Pada jalur pertama, hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan dijaga dan dikembangkan untuk kepentingan strategis masing-masing negara. Pada jalur kedua, pendekatan yang berpusat pada korban digunakan untuk menyelesaikan masalah historis. Presiden Moon menyatakan dalam pidato Hari Pembebasan pada 15 Agustus 2017, bahwa masalah sejarah tidak boleh menghambat hubungan Korea Selatan-Jepang, tetapi masalah sejarah juga tidak boleh diabaikan.[85] Namun, metode ini menghadapi kesulitan karena Jepang menolak renegosiasi dan menganggap kesepakatan tahun 2015 sebagai penyelesaian terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintahan Moon untuk memberikan pengakuan formal dan ruang peringatan bagi para korban di tingkat nasional, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Setelah melihat seberapa efektif peninjauan kebijakan *Comfort Women* di bawah pemerintahan Moon Jae-in, analisis menunjukkan konflik rumit antara kebutuhan diplomatik dan tuntutan keadilan substansial. Ini adalah dilema utama dalam politik luar negeri Korea Selatan modern. Dengan membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation*, pemerintahan Moon secara terang-

[84] Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, *op.cit.*, section "nature of the *Agreement*."
[85] Hankyoreh English Edition, *"Moon Jae-in says S. Korea-Japan relations should not be held up by historical…," Hankyoreh*, August 18, 2017, https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/807056.html.

terangan mengutamakan keadilan historis daripada stabilitas hubungan bilateral dengan Jepang. Karena kebijakan ini, ketegangan bilateral dengan Jepang meningkat, yang merupakan konsekuensi diplomatik yang tidak dapat dihindari. Salah satu contohnya adalah pembatasan ekspor bahan kimia penting untuk industri semikonduktor Korea Selatan pada 2019, yang memicu retaliasi ekonomi. Namun, metode Moon berhasil mengubah paradigma diskursif dari orientasi "*Final and Irreversible*" ke arah pendekatan yang berpusat pada korban.

3.2 Pemenuhan Hak-hak Korban *Comfort Women*

Presiden Moon Jae-in mengubah pendekatan diplomatik Korea Selatan terhadap masalah *Comfort Women* dengan meninjau ulang kesepakatan tahun 2015 dengan Jepang. Kesepakatan 2015 mencakup pembentukan *Reconciliation and Healing Foundation* dengan dana 1 miliar yen dari Jepang untuk memberikan dukungan medis, psikologis, dan finansial kepada para penyintas. Namun, yayasan ini dikritik karena kurangnya keterlibatan korban dalam proses pembentukan dan pengelolaan dana. Upaya sebelumnya, *Asian Women's Fund* (AWF) yang didirikan Jepang pada tahun 1995, juga gagal karena sebagian besar dibiayai oleh donasi pribadi bukan dana pemerintah, sehingga banyak korban menolak kompensasi tersebut. Setelah menghadapi kritik serupa terkait legitimasi dan efektivitasnya, AWF akhirnya dibubarkan pada tahun 2007.[86]

Sebagai hasil peninjauan kebijakan pemerintahan Moon, *Reconciliation and Healing Foundation* dibubarkan pada November 2018. Keputusan ini berdampak signifikan terhadap status hukum dan diplomatik para korban. Di satu sisi, menurut penelitian Lee dan Kim, tindakan ini memberikan kesempatan kepada para penyintas untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kesepakatan yang dinyatakan "final dan tidak dapat diubah". Namun di sisi lain, juga menciptakan ketidakpastian hukum baru tentang status klaim mereka terhadap pemerintah Jepang. Kebijakan Moon Jae-in tentang masalah *Comfort Women* menandai pergeseran dari pendekatan "penyelesaian sekali jadi" ke proses pencapaian keadilan berkelanjutan. Pendekatan Moon berpusat pada korban, berdasarkan rekomendasi *Task Force*, dengan mengembalikan martabat dan

[86] Putri, *op.cit., hlm. 79.*

kehormatan korban serta mengobati luka psikologis mereka menjadi bagian penting penyelesaian masalah. Partisipasi korban dalam proses pemulihan sangat ditekankan, dengan pemerintah bertanggung jawab mengumpulkan informasi tentang maksud dan posisi para korban selama negosiasi diplomatik.

Pemerintahan Moon menunjukkan pergeseran cara berpikir dari solusi diplomatik menuju pendekatan yang lebih berfokus pada keadilan dan pemulihan bagi para korban *Comfort Women*. Korea Selatan meningkatkan dukungan psikologis dan layanan kesehatan dengan menambah alokasi anggaran nasional dan meningkatkan fasilitas di *House of Sharing*, tempat tinggal komunal para korban. Aspek pendampingan psikologis dan terapi trauma juga mengalami perbaikan signifikan. Lee et al. mencatat bahwa Moon memprioritaskan terapi trauma berkelanjutan dengan merekrut profesional traumatologi yang memahami dampak jangka panjang kekerasan seksual berbasis gender dalam konteks kolonialisme. Program terapi ini tidak hanya berfokus pada pengobatan gejala trauma, tetapi juga membantu penyintas mengembalikan harga diri dan memperoleh kemandirian.[87]

3.2.1 Bantuan Finansial Korban *Comfort Women*

Bantuan finansial kepada para korban juga mengalami peningkatan signifikan selama pemerintahan Moon Jae-in. Pada 2017, bantuan bulanan sebesar 1.300 KRW dan bantuan kesehatan 1.400 KRW, kemudian pada 2018 meningkat menjadi 1.400 KRW untuk bantuan bulanan dan 1.500 KRW untuk biaya kesehatan.[88] Pada 2021, bantuan mencapai 1.500 KRW dan biaya kesehatan 1.700 KRW. Chung Young Ai, sebagai *Ministry of Gender Equality and Family* pada 2020, aktif mengunjungi para penyintas dari Maret hingga April 2021,[89] menemui korban *Comfort Women* yang masih hidup untuk memeriksa kesehatan dan mendengarkan kebutuhan mereka langsung. Jumlah penerima manfaat juga

[87] Jeewon Lee, et al. "Psychiatric Sequelae of the Former '*Comfort Women*' Currently Alive in South Korea." *Psychiatry Investigation* 15, no. 4 (2018): 336-343. https://doi.org/10.30773/pi.2017.11.08.2.
[88] *Ministry of Gender Equality and Family* (MOGEF), *Annual Report on Support for Victims of Japanese Military Sexual Slavery* (Seoul: MOGEF, 2017-2021)
[89] *Yonhap News Agency,* "Minister of Gender Equality visits surviving '*Comfort Women*'," Yonhap News, April 7, 2021, https://en.yna.co.kr/view/PYH20210407104500325.

meningkat berkat pendekatan proaktif dalam menemukan dan menghubungi penyintas yang sebelumnya tidak menerima layanan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau mengalami stigma sosial. Namun, penilaian dukungan psikologis menemukan kekurangan terapis berpengalaman dalam menangani trauma historis kompleks.

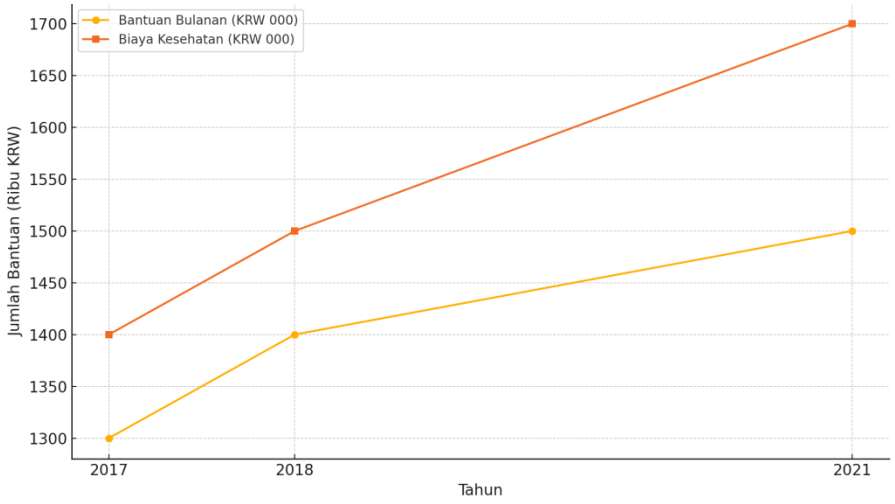

Gambar 3. 1 Grafik Peningkatan Bantuan Finansial Korban *Comfort Women*

Sumber: Data diolah oleh penulis dari laporan Ministry of Gender Equality and Family Korea Selatan (2017-2021)

Gambar 3. 2 Kunjungan Resmi Ministry of Gender Equality and Family

Sumber: Yonhap News Agency. "Gender Equality and Family Minister Chung Young-ai dan Lee Yong-soo, penyintas kekerasan seksual oleh militer Jepang, mengunjungi museum Comfort Women di Daegu, Korea Selatan." 7 April 2021.

Korea Selatan menerapkan pendekatan berpusat pada korban dengan memperkuat memorialisasi dan edukasi publik tentang masalah *Comfort Women* selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Di bawah kepemimpinannya, memori dan edukasi publik tentang ini menjadi sangat penting. Museum *Comfort Women* di Seoul, yang didirikan pada Mei 2018 sebagai tanggapan atas permintaan masyarakat untuk ruang memori yang lebih representatif, adalah salah satu tujuan utama pemerintahan Moon.[90] Pada Juli 2017, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat proyek memorialisasi, pemerintah berencana mendirikan museum di dekat Museum Nasional Korea di Yongsan.[91] Selain itu, pemerintah berencana untuk mendaftarkan masalah *Comfort Women* sebagai warisan UNESCO, menunjukkan komitmen mereka untuk mengabadikan sejarah ini secara internasional. Museum ini tidak hanya menampilkan pameran tetapi juga bertindak sebagai pusat pendidikan dan penelitian dengan menyimpan testimoni para penyintas dan bukti sejarah. Desain museum menggunakan pendekatan kuratorial yang berpusat pada pengalaman individu para penyintas, mengubah cerita dari statistik kolektif menjadi cerita yang lebih personal untuk mendorong pengunjung berempati. Kementerian Pendidikan pada masa Moon Jae-in juga melakukan perubahan besar dalam kurikulum pendidikan tentang sejarah *Comfort Women*. Pendekatan pedagogis dalam kurikulum baru ini menekankan analisis kritis terhadap sistem eksploitasi gender dalam konteks kolonialisme dan perang, menggunakan testimoni para penyintas sebagai sumber utama dalam pembelajaran sejarah.

Korea Selatan mengambil langkah besar untuk mendukung litigasi dan reformasi hukum terkait masalah *Comfort Women* selama pemerintahan Presiden Moon Jae-in (2017-2022). Pada 2018, pemerintahan Moon membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation*, memungkinkan para penyintas untuk menggugat pemerintah Jepang. Kebijakan Moon Jae-in terkait masalah *Comfort Women* berfokus pada reformasi hukum dan dukungan litigasi, yang merupakan pergeseran besar dari pendekatan sebelumnya. Moon menerapkan pendekatan

[90] South Korea's Gender Equality Minister Chung Hyun-back mengatakan "pemerintah akan membangun museum *Comfort Women*…," *Yonhap News Agency,* July 20, 2017, (LEAD) S. Korea to build *Comfort Women* museum in Seoul | Yonhap News Agency
[91] *Ibid.*

"*victim-centered*" dalam membentuk saluran khusus di Kementerian Kehakiman untuk menangani kasus *Comfort Women*, sehingga mempercepat proses klaim. Kemudian, pada Januari 2021 ketika Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Jepang harus membayar kompensasi[92] kepada dua belas mantan *Comfort Women*. Meski terkejut dengan keputusan ini, Presiden Moon menyatakan Korea Selatan akan terus berdialog dengan Jepang untuk menyelesaikan masalah ini. Evaluasi proses litigasi selama pemerintahan Moon menunjukkan hasil beragam namun signifikan.

Pemerintahan Moon mengambil pendekatan berbeda dalam diplomasi internasional dengan fokus pada internasionalisasi masalah melalui forum multilateral. Moon secara sistematis memasukkan isu *Comfort Women* ke dalam agenda Dewan HAM PBB, menggunakan setiap sidang untuk meminta testimoni langsung dari para penyintas. Pendekatan Moon Jae-in ditandai dengan pergeseran paradigma penting yang melibatkan korban secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan korban dalam proses diplomatik meningkat signifikan dengan Moon mengubah protokol konvensional dengan mengundang penyintas seperti Lee Yong-soo untuk bergabung dengan delegasi resmi dalam pertemuan bilateral dan forum multilateral, termasuk sesi di Dewan HAM PBB tahun 2019. Kehadiran fisik korban di ruang diplomatik formal memberikan legitimasi moral bagi posisi Korea Selatan. Koalisi ini tidak hanya berfokus pada tuntutan kompensasi, tetapi juga berupaya mendokumentasikan sejarah dan membentuk ingatan kolektif tentang kekerasan kolonial.

Kampanye kesadaran publik selama pemerintahan Moon berhasil mengubah persepsi masyarakat Korea Selatan tentang *Comfort Women* dari sekadar korban menjadi penyintas dan agen perubahan sosial. Berbagai kampanye seputar isu ini dirancang untuk menjangkau generasi muda melalui berbagai bentuk media. Kampanye digital #JusticeforComfortWomen yang didukung pemerintah Moon berhasil mengglobalkan isu ini.[93] Kampanye kesadaran publik

[92] Sasaki, Keiichi, dan Min-Jung Kim. "Legal Tensions in East Asia: *Comfort Women* and Jurisdictional Disputes." *Journal of East Asian Law 18,* no. 2 (2021): 91-110
[93] The Korea Times, *Moon vows efforts to spread awareness of Comfort Women issue,* 14 Agustus 2019, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/08/356_273983.html.

dibawah pemerintahan Moon Jae-in pun diperkuat melalui peringatan resmi, seperti penetapan 14 Agustus 2018 sebagai Hari Peringatan Nasional untuk Korban *Comfort Women* pertama, yang ditandai dengan peresmian monumen baru sebagai bentuk penghormatan dan komitmen pendidikan masyarakat tentang isu ini. Pemerintahan Moon mengambil pendekatan yang berbeda secara signifikan dari pemerintahan sebelumnya, dimulai dengan pembentukan Tim Tugas Khusus pada Juli 2017 untuk meninjau kesepakatan 2015 antara Korea Selatan dan Jepang.

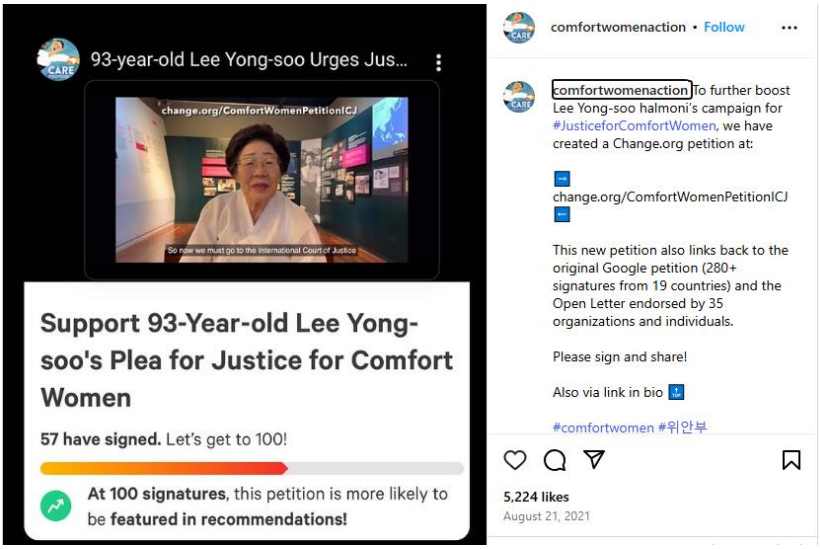

Gambar 3. 3 Cuplikan Kampanye #JusticeforComfortWomen

Sumber: Instagram @comfortwomenaction

Hasil diplomasi Moon Jae-in menunjukkan kompleksitas tinggi terhadap posisi Jepang dan pengakuan internasional yang mengecam kurangnya akuntabilitas Jepang dalam menyelesaikan isu *Comfort Women*. Salah satunya seperti pernyataan *Amnesty International* berikut:

> *"The Japanese government must not deprive these victims of the right to full reparation and an effective remedy, and should refrain from using*

procedural hurdles such as state immunity, when crimes against humanity and war crimes were committed." Amnesty International, 2020.[94]

Sebagian besar penyintas menyambut pendekatan berfokus pada korban. Namun demikian, terdapat perbedaaan pendapat tentang efektivitas kebijakan tersebut, terutama terkait dampak langsung terhadap kesejahteraan dan hak-hak korban.[95] Secara keseluruhan, kebijakan Moon Jae-in tentang masalah *Comfort Women* menciptakan preseden penting dalam penyelesaian kejahatan masa lalu yang melibatkan kekerasan seksual dalam konflik. Meskipun terdapat kritik dari berbagai sudut pandang politik dan diplomatik, keputusan memprioritaskan martabat dan suara penyintas daripada kepentingan pragmatis menegaskan prinsip bahwa keadilan transisional tidak boleh dikorbankan untuk keuntungan politik jangka pendek. Meskipun Jepang tetap mempertahankan posisinya dan resolusi akhir sulit dicapai, kebanyakan peneliti setuju strategi Moon telah berhasil mengubah masalah *Comfort Women* dari isu bilateral menjadi masalah HAM global, merupakan pencapaian diplomatik signifikan dalam sejarah hubungan Korea Selatan-Jepang. Upaya diplomatik Korea Selatan menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, namun hal ini menegaskan bahwa proses keadilan untuk *Comfort Women* masih jauh dari selesai, meskipun telah terjadi kemajuan besar selama periode pemerintahan (2017-2022). Pemerintahan Moon telah menunjukkan komitmen menempatkan para penyintas sebagai bagian penting dalam penyelesaian masalah, namun kesulitan implementasi kebijakan dan dinamika diplomatik dengan Jepang mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Transformasi epistemik dalam pemahaman tentang keadilan historis dan kekerasan berbasis gender merupakan pencapaian besar yang akan berdampak pada standar regional dan global jangka panjang.

---

[94] Amnesty International, *South Korea: Lawsuits against the Japanese Government last chance for justice for 'Comfort Women', 12 Agustus 2020,* https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/south-korea-lawsuits-against-the-japanese-government-last-chance-for-justice-for-comfort-women/.

[95] Maki Kimura, "Unfolding the '*Comfort Women*' Debates in Japan and South Korea." *Journal of Asian Studies,* 75 (3), 693-712.

BAB IV
RESPON ATAS KEBIJAKAN *COMFORT WOMEN* PADA ERA MOON JAE-IN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN

Lebih dari sekadar catatan kelam sejarah, kasus *Comfort Women* merupakan isu multidimensional yang menyentuh aspek diplomatik, politik, hukum dan kemanusiaan. Pemerintahan Moon Jae-in menandai perubahan pendekatan dalam penanganan isu ini, terutama melalui evaluasi terhadap perjanjian 2015 antara Korea Selatan dan Jepang. Kebijakan tersebut kemudian memicu berbagai respon, baik dari pihak Jepang maupun dari dalam negeri Korea Selatan sendiri.

Bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, menganalisis respon pemerintah Jepang terhadap peninjauan ulang Perjanjian 2015 yang dilakukan oleh Korea Selatan, khususnya pada masa pemerintahan Moon Jae-in, serta bagaimana dinamika diplomasi bilateral berkembang. Bagian kedua membahas implementasi kebijakan pemerintah Korea Selatan, termasuk pelibatan korban dan organisasi advokasi (KCJR), dalam rangka memenuhi hak-hak korban *Comfort Women*. Analisis ini akan dibagi menjadi beberapa subbahasan yang mencakup kinerja pelaksanaan kebijakan, peran pelaksana dan pengawas, hingga tantangan yang dihadapi. Analisis dalam bab ini didasarkan pada premis bahwa pemenuhan hak-hak korban *Comfort Women* tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik Korea Selatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika diplomatik Jepang. Hal ini penting karena tuntutan utama para korban, yang mencakup pengakuan tanggung jawab hukum dan permintaan maaf resmi, secara inheren melibatkan pemerintah Jepang sebagai pihak yang harus memenuhinya.

4.1 Respon Jepang Terhadap Audiensi yang Dilakukan Korea Selatan

Kesepakatan *Comfort Women* 2015 antara Jepang dan Korea Selatan mengalami krisis mendalam ketika administrasi Moon Jae-in mengambil pendekatan progresif untuk meninjau kembali perjanjian tersebut. Kesenjangan persepsi mendasar muncul antara kedua negara, di mana Jepang memandang

tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab moral yang dapat diselesaikan melalui diplomasi, sementara Korea Selatan menekankan tanggung jawab hukum yang memerlukan kompensasi individu dan pengakuan eksplisit. Perselisihan ini bukan sekadar ketidaksepakatan diplomatik biasa, melainkan mencerminkan konflik fundamental antara pendekatan legalistik tradisonal dengan tuntutan keadilan transisional modern yang berpusat pada korban. Pemerintah Jepang menunjukkan sikap defensif yang tegas dengan menganggap kesepakatan 2015 bersifat "*Final and Irreversible*". Perdana Menteri Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Taro Kono mengecam keras keputusan pemerintahan Moon Jae-in, dan menyatakan bahwa langkah tersebut '*unacceptable*' dalam hubungan diplomatik antara kedua negara.[96] Jepang berargumen sebagai berikut:

1. Kesepakatan telah dicapai melalui proses diplomatik sah.

2. Jepang telah menyediakan dana 1 miliar yen untuk *Reconciliation and Healing Foundation*.

3. Perjanjian secara resmi menyatakan penyelesaian yang final.

Sebagai bentuk protes, Jepang menarik sementara Duta Besarnya dari Seoul pada Januari 2017[97] setelah Korea Selatan mendirikan patung *Comfort Women* di depan Konsulat Jepang di Busan dan mengumumkan peninjau ulang kesepakatan 2015. Jepang berargumen bahwa kesepakatan memenuhi semua elemen perjanjian internasional yang mengikat, yaitu niat untuk terikat secara hukum, persetujuan jelas dari kedua pihak, dan partisipasi perwakilan resmi. Selain itu, Jepang juga menegaskan telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan dana 1 miliar yen dan permintaan maaf resmi dari PM Abe, sehingga Korea Selatan tidak memiliki alasan hukum untuk membatalkan perjanjian.

Administrasi Moon mengambil pendekatan fundamental berbeda dengan menganggap kesepakatan 2015 cacat dan tidak memadai karena dibuat tanpa berkonsultasi dengan para korban. Pemerintah Moon menekankan bahwa

[96] The Japan Times, "*Japan says South Korea's review of 2015 Comfort Women accord 'unacceptable',* 28 December 2017.
[97] Reuters, "*Japan recalls envoy to South Korea over statue of 'Comfort Women'*," 9 January 2017.

kesepakatan tidak memberikan pengakuan tanggung jawab hukum yang jelas dari Jepang dan tidak menyediakan kompesasi langsung kepada para korban. Meskipun tidak secara resmi membatalkan perjanjian, pemerintahan Moon menghentikan pelaksanaannya, termasuk penggunaan dana kompensasi Jepang, dan memberikan dana nasional untuk membantu penyintas. Tim Tugas Khusus dibentuk pada 2017 untuk mengevaluasi perjanjian, mencerminkan komitmen Moon memberikan keadilan substantif bagi para korban.

Ketegangan memuncak ketika Tim Tugas Khusus merilis hasil tinjauan pada Desember 2017 yang menyatakan kesepakatan cacat karena tidak melibatkan suara korban. Eskalasi mencapai puncak pada Juli 2019 ketika Jepang membatasi ekspor material penting untuk industri semikonduktor Korea Selatan sebagai pembalasan.[98] Jepang juga menghapus Korea Selatan dari '*white list*' negara dengan akses ekspor mudah,[99] mempersulit perdagangan bilateral. Ketegangan meluas ke berbagai sektor, termasuk penurunan drastis wisatawan dan kampanye boikot konsumen terhadap produk Jepang di Korea Selatan yang mengakibatkan penurunan penjualan merek seperti Uniqlo hingga 40% pada paruh kedua 2019.[100]

Gambar 4. 1 Dokumentasi Aksi Boikot Konsumen di Korea Selatan

Sumber: The Korea Times

[98] Reuters, "*Japan to restrict high-tech exports to South Korea as row over wartime forced labor deepens,"* 1 July 2019.
[99] Jeniffer Gracellia, "IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH *COMFORT WOMEN* TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019," *Verity-UPH Journal of International Relations,* Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan, (2020): 44-55.
[100] Kompas.com, "*Terkena Boikot, Penjualan Uniqlo di Korea Selatan Merosot 40 Persen,"* 16 Oktober 2019, https://money.kompas.com/read/2019/10/16/210000126/terkena-boikot-penjualan-uniqlo-di-korea-selatan-merosot-40-persen.

Hubungan ekonomi kedua negara mengalami kemunduran signifikan setelah keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan tahun 2018 yang mewajibkan perusahaan Jepang membayar kompensasi kepada korban kerja paksa masa perang. Meskipun Jepang mengklaim pembatasan ekspor berdasarkan pertimbangan keamanan nasional, *timing* yang bersamaan dengan keputusan pengadilan menimbulkan pandangan bahwa ini adalah retaliasi ekonomi. Ketidaksepakatan ini telah menghentikan berbagai kerja sama strategis, termasuk negosiasi bilateral tentang perdagangan, keamanan regional, dan kerja sama multilateral seperti *Trilateral Summit* Jepang-Korea Selatan-Tiongkok.

Pemerintah Jepang secara konsisten menolak tuntutan permintaan maaf resmi dan kompensasi langsung dari para korban *Comfort Women* dengan berpegang pada posisi bahwa masalah ini telah diselesaikan melalui perjanjian internasional. Jepang meyakini bahwa Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 dan Perjanjian Klaim Jepang-Korea 1965 telah menyelesaikan semua klaim kompensasi terkait masa kolonial, termasuk kasus *Comfort Women*. Menurut interpretasi Jepang, ketika Korea Selatan menerima 800 juta dolar dalam bentuk hibah dan pinjaman pada tahun 1965,[101] hal tersebut berarti penyelesaian semua klaim individu, sehingga tanggung jawab kompensasi beralih kepada pemerintah Korea Selatan, bukan Jepang. Ketika Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Januari 2021 memutuskan bahwa Jepang harus membayar 100 juta won kepada masing-masing dari dua belas mantan *Comfort Women*, Jepang merespons dengan keras dan mengklaim prinsip kekebalan kedaulatan negara berdasarkan hukum internasional. Jepang mendasarkan posisinya pada prinsip kedaulatan negara yang dilindungi hukum internasional konvensional dan keyakinan bahwa perjanjian bilateral telah menyelesaikan semua klaim terkait periode kolonial.

Jepang menggunakan kebijakan diplomasi ekonomi dan *Official Development Assistance* (ODA) di Asia Tenggara sebagai bagian dari strategi diplomasi lunak untuk memperkuat hubungan bilateral, meskipun beberapa pihak mengkritik bahwa pendekatan ini sering mengabaikan dimensi keadilan sejarah

[101] Musindosi Natasha Zimba Kalula, "The *Comfort Women*: A study exploring the nuances of the movement," *Master's Thesis,* University of Cape Town, (2023): 40.

terkait isu *Comfort Women.*[102] Kesepakatan *Comfort Women* 2015 yang mencakup pembentukan yayasan dengan dana 1 miliar yen menjadi contoh konkret penggunaan leverage ekonomi dalam diplomasi. Strategi ini memaksa pemerintahan Moon menyeimbangkan antara dukungan terhadap keadilan historis dan stabilitas ekonomi nasional, meskipun akhirnya Moon tetap memilih mendukung keadilan historis dengan risiko memburuknya hubungan ekonomi jangka pendek. Korea merespons dengan pengurangan kerja sama intelijen militer (GSOMIA) dan boikot konsumen, menunjukkan bahwa konflik sejarah kini mencakup bidang strategis ekonomi dan tidak lagi terbatas pada domain simbolik.[103]

Reconciliation and Healing Foundation didirikan pada Juli 2016 sebagai implementasi perjanjian bilateral tahun 2015, didanai kontribusi 1 miliar yen dari pemerintah Jepang untuk membantu korban *Comfort Women* yang masih hidup. Namun, ketika pemerintahan Moon Jae-in mengumumkan pembubaran yayasan pada November 2018, Jepang merespons dengan sangat keras karena menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan yang telah dianggap "*Final and Irreversible*". Pemerintah Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo Abe menganggap pembubaran sepihak *Reconciliation and Healing Foundation* sebagai bukti ketidakmampuan Seoul memenuhi komitmen diplomatik[104] dan merusak kepercayaan internasional. Sebagai respons, Jepang mengambil tindakan diplomatik konkret dengan menolak konsultasi bilateral, menolak berpartisipasi dalam forum diskusi regional, dan mengadakan protes resmi melalui kedutaan besar di Seoul.

Pemerintahan Moon Jae-in mengadopsi pendekatan proaktif dengan memindahkan isu *Comfort Women* dari ranah bilateral ke forum multilateral dan lembaga internasional. Korea Selatan memperingati Hari *Comfort Women*

---

[102] Kawakami Takashi, "Japan's Foreign Policy Dilemma: Historical Memory and Bilateral Tensions with Korea," *Asian Survey*, vol. 61, no. 4 (2021): 582–599.
[103] Eunjung Han and Seungwoo Kim, "Economic Statecraft and Memory Politics in East Asia: A Case of Japan–South Korea Trade Dispute," *Journal of East Asian Studies* 21, no. 2 (2021): 233–255.
[104] *"Japan raps S. Korea's decision to dissolve 'Comfort Women' fund," The Japan Times*, 22 November 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/22/national/politics-diplomacy/japan-raps-s-koreas-decision-dissolve-comfort-women-fund/.

Nasional setiap 14 Agustus, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menggelar pameran, seminar, dan kesaksian publik di parlemen serta universitas luar negeri. Strategi ini berhasil meningkatkan kesadaran global tentang sejarah kekerasan seksual dalam konflik dan mendorong simpati internasional terhadap korban. Jepang merespons dengan keprihatinan mendalam terhadap citra dan interpretasi historis negara di mata dunia. Tokyo menentang diplomasi memori Korea Selatan, menganggapnya sebagai manipulasi sejarah yang melanggar kesepakatan bilateral 2015. Menurut Kimura dan Kumagai, Jepang khawatir internasionalisasi masalah ini[105] akan mengikis citranya sebagai negara normal yang telah mengatasi sejarah imperialisme. Jepang mengembangkan strategi terorganisir dalam merespons upaya Korea Selatan, termasuk mengancam meninjau ulang pendanaan sukarela ke UNESCO ketika dokumen *Comfort Women* yang ingin dimasukkan ke dalam Daftar *Memory of the World* UNESCO pada 2017.[106] Konflik sejarah ini merambah ke bidang budaya ketika Jepang membatalkan partisipasinya dalam pameran seni internasional *Aichi Triennale* Agustus 2019[107] karena karya seni yang menampilkan *Statue of Peace Comfort Women*.

Pemerintahan Abe dan Suga kontroversial mendukung penerbitan buku teks sekolah[108] yang meminimalkan atau menghilangkan referensi terhadap *Comfort Women*, mendapat kecaman keras dari Korea Selatan dan komunitas internasional. Pada 2021, laporan sejarawan yang berafiliasi dengan pemerintah Jepang menyatakan tidak ada bukti cukup untuk mendukung gagasan pemaksaan terhadap *Comfort Women*,[109] meskipun komunitas akademik internasional secara luas menentang pandangan ini. Perwakilan Jepang sering mengintervensi ketika masalah *Comfort Women* diangkat pada pertemuan multilateral[110] seperti Komisi

[105] Kimura Kan and Kumagai Hiroshi. "History and Diplomacy: *Comfort Women* Issue in Japan-South Korea Relations." *East Asian Studies Review,* vol. 33, no. 2, 2020.
[106] Justin McCurry, "Japan Threatens to Halt UNESCO Funding over '*Comfort Women*' Document Bid," *The Guardian*, 26 October 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/26/japan-threatens-to-halt-unesco-funding-over-comfort-women-document-bid.
[107] Tadasu Takahashi, "Aichi Triennale 2019 and Freedom of Expression," *Tokyo Review*, May 19, 2020, https://www.tokyoreview.net/2020/05/aichi-triennale-2019-freedom-expression.
[108] Al Jazeera. "Japan textbook revisions spark anger in South Korea." April 2021.
[109] Yoshimi, *Comfort Women* and Japanese Imperial Army*, Columbia University Press*, 2020.
[110] United Nations Human Rights Council. "Summary Records of 44th Session — Japan's response to *Comfort Women* debate." 2021.

HAM PBB dan ASEAN *Plus Three*, menegaskan bahwa masalah telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral. Masyarakat Jepang mengalami polarisasi signifikan dengan spektrum pendapat dari aktivis liberal hingga kelompok revisionis. Takahashi dan Wakabayashi mengidentifikasi bahwa generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap pengakuan kesalahan masa lalu, meskipun kesadaran publik berkembang secara bertahap. Pemerintahan Moon Jae-in memicu perubahan dramatis dalam persepsi publik Jepang ketika meninjau ulang kesepakatan *Comfort Women* 2015 dan membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation* pada November 2018. Persepsi positif Jepang terhadap Korea Selatan anjlok dari 29,4% menjadi 20,9% menurut survei Genron NPO,[111] sementara fenomena "*Korea Fatigue*" semakin mendominasi diskursus publik disertai frustasi terhadap strategi Korea Selatan yang dianggap sebagai "*moving the goalposts*".

Liputan media Jepang tentang kampanye internasional Korea Selatan sering diinterpretasikan sebagai upaya sistematis mempermalukan Jepang secara global, mendorong sentimen defensif masyarakat. Kusunoki dan Tanaka mengungkap bagaimana program berita utama secara reguler menampilkan narasi yang menekankan serangan diplomatik Korea Selatan terhadap kehormatan Jepang.[112] Perubahan opini publik ini secara langsung memengaruhi posisi diplomatik pemerintahan Jepang, dengan survei *Kyodo News* menunjukkan 57% masyarakat mendukung keputusan pemerintah menghindari konsesi tambahan.[113]

Perbedaan posisi normatif menjadi kendala utama, di mana Korea Selatan menentang kesepakatan 2015 karena tidak melibatkan korban secara langsung, sementara Jepang menekankan pentingnya menghormati kesepakatan sebagai komitmen internasional yang sah. Situasi semakin rumit dengan meningkatnya nasionalisme dan keputusan pengadilan Korea Selatan pada 2021 yang memerintahkan kompensasi kepada korban, yang dianggap Jepang melanggar

[111] Genron NPO, "Japan-South Korea Public Opinion Poll 2021," *Genron NPO Report*, December 2021.
[112] Kusunoki Ayako dan Tanaka Akihiro, "Media framing of historical disputes: The case of Japan–South Korea *Comfort Women* issue," *Japanese Journal of Political Science,* Vol. 22, No. 1, 2021.
[113] Kyodo News, "Poll: Majority of Japanese oppose further concessions on *Comfort Women* issue," February 2021.

prinsip kekebalan negara. Kesenjangan persepsi historis merupakan fenomena fundamental dalam hubungan internasional modern[114] dimana berbagai negara memiliki interpretasi berbeda tentang peristiwa masa lalu. Narasi sejarah nasional sering direkonstruksi untuk memenuhi kebutuhan politik domestik dan membangun identitas nasional yang kohesif, menciptakan hambatan dalam negosiasi dan normalisasi hubungan bilateral. Masalah *Comfort Women* menjadi representasi paling jelas dari kesenjangan persepsi historis fundamental antara Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan memandang perbudakan seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II sebagai pelanggaran HAM berat[115] yang memerlukan pengakuan resmi dan pertanggungjawaban moral-hukum. Sebaliknya, Jepang mengambil pendekatan legalistik dengan menganggap masalah ini telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral seperti Kesepakatan 1965 dan 2015. Perbedaan ini berakar pada pembentukan identitas nasional yang berbeda, di mana Korea Selatan di era Moon Jae-in mengadopsi pendekatan berpusat pada korban yang menuntut pengakuan langsung dan pelibatan korban dalam proses kebijakan.

Persaingan geostrategis Amerika Serikat dan China di kawasan Asia-Pasifik turut memengaruhi dinamika perselisihan sejarah. Wong dalam '*Asian Perspective'*[116] menganalisis bagaimana kedua kekuatan besar kadang mengurangi penekanan pada masalah *Comfort Women* untuk memprioritaskan kerja sama keamanan regional. Aktivisme internasional Korea Selatan, terutama selama masa pemerintahan Moon Jae-in, berhasil mengubah perdebatan dari isu bilateral menjadi narasi universal tentang keadilan sejarah dan kejahatan seksual dalam konflik bersenjata, menciptakan tekanan internasional signifikan terhadap Jepang. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah keadilan transisional[117] yang melibatkan tidak hanya aspek hukum formal tetapi juga dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif, serta

[114] Lind, Jennifer M, "Sorry States: Apologies in International Politics," *Cornell University Press*, 2008.
[115] Soh, C. Sarah, "The *Comfort Women*: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan," *University of Chicago Press*, 2008.
[116] Wong Joseph, "Geopolitics and Historical Memory in East Asia," *Asian Perspective,* Vol. 44, No. 2, 2020.
[117] Subotic Jelena, "Narrative, Justice and the Politics of Memory," *Journal of International Relations and Development,* Vol. 19, No. 4, 2016.

menunjukkan tantangan yang lebih luas dalam rekonsiliasi pasca-konflik di kawasan Asia Timur. Tanpa narasi sejarah yang disepakati, setiap langkah rekonsiliasi seringkali dianggap tidak tulus oleh pihak lain,[118] dan selama kedua negara belum mencapai kesepakatan tentang makna dan konsekuensi sejarah mereka, ketegangan struktural akan tetap berulang dalam diplomasi bilateral. Hal ini menunjukkan kompleksitas mengatasi warisan sejarah kontroversial melalui mekanisme diplomatik konvensional dan perlunya pendekatan inovatif yang lebih komprehensif untuk mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan.

4.2 Implementasi Kebijakan *Comfort Women* Oleh Korea Selatan

Kesepakatan *Comfort Women* tahun 2015 antara Korea Selatan dan Jepang justru menimbulkan kontroversi baru daripada menyelesaikan masalah yang telah berlangsung sejak 1932. Meskipun Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengucapkan maaf dan berjanji membantu korban yang masih hidup, kesepakatan ini ditolak keras oleh para mantan *Comfort Women* karena dianggap tidak inklusif, tidak transparan, dan tidak melibatkan korban dalam proses perumusan kebijakan. Pemerintahan Moon Jae-in yang berkuasa sejak 2017 mengambil langkah kontroversial dengan membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation* pada 2018 dan mengembalikan sisa dana kompensasi sebesar 1 miliar yen kepada Jepang. Keputusan ini merupakan bentuk penolakan terhadap metode yang dianggap mengabaikan suara korban. Moon menyatakan bahwa meskipun perjanjian 2015 telah diakui secara resmi sebagai perjanjian antanegara,[119] hal tersebut tidak dapat menghilangkan kesedihan korban yang belum mendapatkan keadilan layak. Pemerintah kemudian memutuskan mendukung kesejahteraan para penyintas menggunakan anggaran negara sendiri, menunjukkan sikap tegas untuk memprioritaskan hak-hak korban daripada kepentingan politik internasional.

Keputusan pengembalian dana memiliki konsekuensi domestik dan internasional yang kompleks. Di dalam negeri, aktivis dan beberapa korban memuji kebijakan ini sebagai komitmen moral pemerintah terhadap keadilan

[118] He Yinan, The Search for Reconciliation: Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II, *Cambridge University Press*, 2009.
[119] The Korea Times, "Moon: *Comfort Women* deal fails to resolve victims' grievances," January 2018.

historis. Namun, muncul kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan memperburuk hubungan Jepang-Korea Selatan yang sudah rapuh dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik baru. Kebijakan ini juga menciptakan preseden diplomatik kontroversial di mana perjanjian internasional dapat dibatalkan secara sepihak karena perubahan pemerintahan atau tekanan domestik, yang dapat mempengaruhi kredibilitas diplomatik kedua negara dalam negosiasi masa depan. Mi Jin Cho menekankan bahwa tindakan negara harus berakar pada pemulihan martabat dan pengakuan suara korban,[120] bukan sekadar simbolik. Pengembalian dana dapat dianggap sebagai pengakuan atas kegagalan sebelumnya dan penegasan bahwa rekonsiliasi sejati membutuhkan keadilan dan partisipasi aktif korban.

Langkah paling signifikan adalah pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation* pada November 2018, yang dilakukan secara bertahap dan konsultatif dengan melibatkan korban sebagai *stakeholder* utama. Pemerintah Moon juga menetapkan 14 Agustus sebagai Hari Peringatan Nasional Korban *Comfort Women* (*Japanese Military Comfort Women Victims Memorial Day*) mulai 2018 untuk menghormati kesaksian pertama Kim Hak-sun, yang berfungsi sebagai momentum tahunan untuk menyebarkan kesadaran melalui acara resmi dan pameran sejarah. Selain itu, pemerintah mendorong inklusi masalah *Comfort Women* dalam kurikulum sekolah melalui reformasi pendidikan sejarah.[121] *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan*, yang dibentuk pada 1990, telah menjadi garda depan dalam memperjuangkan hak-hak korban *Comfort Women* di tingkat nasional dan internasional. Sejak 1992, *Korean Council* mengadakan *Wednesday Demonstration* di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul bersama para penyintas dan simpatisan untuk menuntut keadilan. Demonstrasi mingguan ini telah berkembang menjadi platform utama yang memperkuat kolaborasi antarnegara dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dalam konflik global.

[120] Mi Jin Cho, "Victim Silencing, Sexual Violence Culture, Social Healing: Inherited Collective Trauma of WWII Korean *Comfort Women,*" 2020.
[121] Ministry of Education, Republic of Korea, "Curriculum Guidelines on Historical Education of *Comfort Women*," 2019.

Hubungan antara pemerintah Moon Jae-in dan masyarakat sipil dalam penanganan isu *Comfort Women* mengalami ketegangan karena perbedaan eskpektasi. Aktivis menginginkan tindakan yang lebih kuat dan menyeluruh, sementara pemerintah harus mempertimbangkan realitas diplomatik dan politik internasional yang kompleks. Meskipun pemerintahan Moon Jae-in merespons kritik dengan mengubah perjanjian 2015, banyak organisasi mengkritik pelaksanaan kebijakan yang cenderung lamban dan berdampak kurang nyata pada kehidupan korban. Kebijakan yang diambil masih dinilai bersifat simbolik seperti pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation* dan penetapan hari peringatan nasional,[122] tanpa memberikan layanan konkret seperti rehabilitasi psikologis berkelanjutan atau bantuan medis jangka panjang.

Gerakan masyarakat sipil juga menghadapi tantangan legitimasi dan akuntabilitas internal, terutama setelah kontroversi yang melibatkan Yoon Mi-hyang,[123] mantan kepala *Korean Council* yang menjadi anggota parlemen. Reaksi para penyintas dan keluarganya terhadap kebijakan pemerintahan Moon Jae-in sangat dinamis dan terbagi.[124] Sebagian menganggap keputusan Moon untuk meninjau ulang kesepakatan 2015 dan membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation* sebagai keberpihakan terhadap suara korban yang selama ini diabaikan. Namun, banyak korban masih kecewa karena kebijakan tersebut belum mengubah kehidupan mereka secara substansial. Faktor usia dan kondisi kesehatan para penyintas *Comfort Women* yang semakin menurun membuat penerapan kebijakan yang efektif semakin mendesak. Sebagian besar penyintas kini telah berusia lanjut, sehingga setiap penundaan berarti mereka kehilangan kesempatan untuk merasakan keadilan yang telah lama diperjuangkan. Kondisi ini menambah tekanan emosional bagi para korban yang merasa waktu mereka terbatas.

[122] Yonhap News Agency, "S. Korea dissolves foundation on *Comfort Women* issue," November 21, 2018.
[123] The Korea Times, "Corruption allegations may tarnish 30 years of '*Comfort Women*' movement," May 2020.
[124] *Korean Council for Justice and Remembrance*, "Survey on *Comfort Women* Survivors' Response to Moon Administration Policies," 2019.

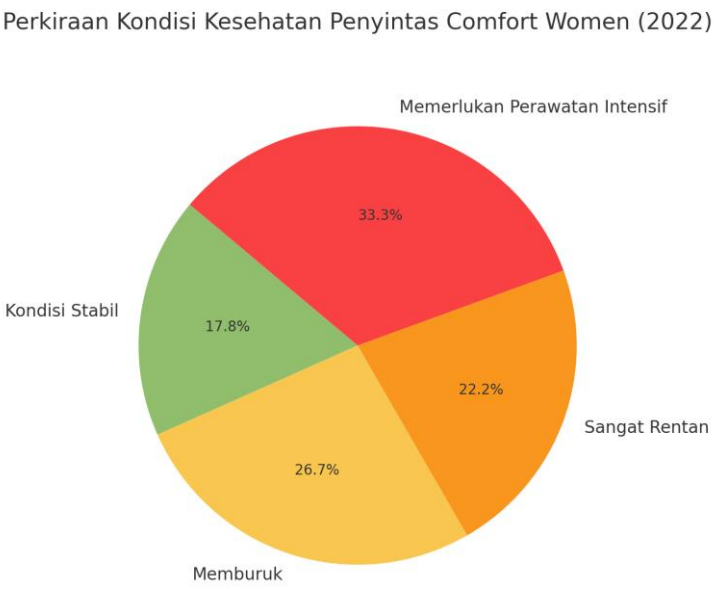

Gambar 4. 2 Grafik Kondisi Kesehatan Penyintas *Comfort Women* tahun 2022

Sumber: Data diolah dari The Ministry of Gender Equality and Family / KWDI (2022)

Data dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan (KWDI) tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas penyintas *Comfort Women* berada dalam kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan. Sebanyak 33,3% dari total penyintas memerlukan perawatan intensif karena mengalami gangguan fisik atau psikologis yang serius. Selain itu, 22,2% lainnya dikategorikan sangat rentan akibat usia lanjut dan daya tahan tubuh yang semakin melemah, menjadikan mereka sangat sensitif terhadap tekanan fisik dan emosional. Sebanyak 26,7% penyintas mengalami kondisi kesehatan yang memburuk, yang kemungkinan besar merupakan akumulasi dari ketidakadilan historis yang belum terselesaikan serta minimnya intervensi medis atau psikososial di masa lalu. Sementara itu, hanya 17,8% penyintas yang berada dalam kondisi stabil. Meskipun stabil, kelompok ini tetap berada dalam pengawasan dan tetap membutuhkan dukungan untuk menjaga kesehatannya. Proporsi yang besar pada kategori kondisi rentan dan memburuk menegaskan bahwa kebijakan pemenuhan hak-hak korban tidak dapat dilepaskan dari faktor kesehatan dan usia. Dengan semakin sedikitnya

jumlah penyintas yang masih hidup, urgensi untuk menghadirkan keadilan yang konkret dan dukungan kesehatan yang menyeluruh menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, grafik ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan kebijakan pemerintah terhadap korban *Comfort Women* secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

Media Korea Selatan mengawasi pelaksanaan kebijakan *Comfort Women* dengan menunjukkan dinamika kompleks antara peran pengawas dan polarisasi opini publik. Kelompok pendukung pendekatan humanis Moon menganggap keadilan harus menjadi prioritas utama meski mengambil sikap konfrontatif terhadap Jepang, dan melihat pembatalan kesepakatan 2015 sebagai langkah tepat untuk mengembalikan martabat penyintas. Sebaliknya, kritikus menganggap pendekatan Moon terlalu konfrontatif dan tidak efektif praktis, malah memperburuk hubungan bilateral dan menurunkan kemungkinan solusi yang benar-benar bermanfaat bagi para korban. Media progresif seperti *Hankyoreh* dan *OhMyNews* mendukung Moon Jae-in dengan menekankan keadilan historis dan keterlibatan korban,[125] sementara media seperti *Chosun Ilbo* dan *JoongAng Ilbo* mengkritik kebijakan Moon sebagai terlalu konfrontatif dan tidak efektif dalam konteks geopolitik Asia Timur.[126]

Implementasi kebijakan menghadapi hambatan diplomatik dan masalah koordinasi kelembagaan yang signifikan. Meskipun dilaksanakan melalui kerja sama berbagai kementerian, efek diplomatik justru memperburuk hubungan Korea Selatan-Jepang. Kritikus menilai kebijakan Moon hanya sebagai tindakan politik simbolik tanpa konsekuensi jangka panjang karena tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan administratif yang mengikat. Implementasi kebijakan lebih terfokus pada elemen diplomatik dan simbolik daripada membangun sistem dukungan langsung yang komprehensif. Para penyintas *Comfort Women* merasa implementor tidak memahami kondisi mereka secara menyeluruh, sementara masalah birokrasi yang lamban, ketidakjelasan tanggung jawab institusional, dan

[125] Hankyoreh, "*Comfort Women* Issue: Government's Pro-Victim Approach Gains Support," August 2018.
[126] Chosun Ilbo, "Moon Administration's Handling of *Comfort Women Agreement* Draws Criticism," December 2018.

koordinasi yang belum optimal antara berbagai pihak turut menghambat efektivitas program. Kemampuan pemerintah untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kesejahteraan para penyintas terhambat oleh kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruh. Pengakuan sejarah terhadap korban *Comfort Women* masih mengalami keterbatasan signifikan, dengan Jepang memberikan pengakuan parsial yang dianggap tidak memadai karena ketidakkonsistenan narasi. Aspek permintaan maaf menunjukkan kesenjangan antara harapan korban dan kenyataan ritual diplomatik.[127] Berbagai mekanisme untuk membantu kesejahteraan korban memiliki keterbatasan struktural signifikan, sementara perlindungan hukum menghadapi tantangan sistemik kompleks. Pemulihan psikologis merupakan komponen paling terabaikan, meskipun trauma yang dialami memliki efek mendalam jangka panjang.

Dalam konteks teori Gayatri Spivak tentang subaltern, korban *Comfort Women* menghadapi paradoks mendalam dalam upaya pemberian suara. Meskipun berbagai negara dan organisasi internasional mengklaim memperjuangkan hak mereka, korban masih tidak memiliki ruang bicara yang nyata. Suara korban telah dimediasi dan ditafsirkan oleh berbagai pihak dengan agenda politik masing-masing, mengubah trauma pribadi mereka menjadi cerita politik yang lebih besar. Kegagalan sistemik dalam menciptakan respons yang sensitif gender terlihat melalui evaluasi kebijakan *Comfort Women* dengan lensa *Gender Mainstreaming*.[128] Prinsip-prinsip pengarusutamaan gender tidak diterapkan secara menyeluruh dalam kebijakan yang dibuat. Kebijakan saat ini memperlakukan korban sebagai penerima bantuan sosial daripada individu yang berhak memilih kebutuhan untuk kesembuhan mereka. Dari perspektif *Gender Mainstreaming*, kebijakan Moon Jae-in perlu dievaluasi berdasarkan seberapa baik perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahap kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menggunakan struktur Caroline Moser, kebijakan tersebut tampaknya responsif terhadap aspek etis dan simbolik[129] seperti pengakuan sejarah dan pengembalian kehormatan, namun tidak

[127] Lind, *op.cit.*
[128] UN Women, "*Gender Mainstreaming* in Practice: A Toolkit," *United Nations*, 2004.
[129] Moser, Caroline O. N, "Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training," *Routledge*, 1993.

memenuhi sepenuhnya kebutuhan strategis dan pragmatis korban dalam hal layanan kesehatan mental, perlindungan hukum, dan dukungan kesejahteraan berkelanjutan. Pengalaman korban *Comfort Women* menunjukkan kompleksitas interseksionalitas yang tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi diskriminasi, menghadapi penindasan berlapis sebagai perempuan, subjek kolonial, individu miskin, dan sering berasal dari kelas sosial rendah.

Kebijakan *Comfort Women* pemerintahan Moon Jae-in menunjukkan komitmen progresif dalam menangani isu dengan menempatkan perspektif korban sebagai prioritas utama dan mengadopsi paradigma keadilan restoratif yang berpusat pada korban. Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan struktural yang signifikan dan belum efektif dalam substansi pelaksanaan. Meskipun menunjukkan kemajuan etis dan simbolik, pelaksanaannya belum memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi para penyintas. Pendekatan transformatif harus memasukkan pemahaman tentang bagaimana pengalaman korban dan trauma kolonial berinteraksi, menciptakan ruang penyembuhan yang menangani trauma individual dan kolektif. Untuk melakukan *Gender Mainstreaming* dengan baik, diperlukan kemampuan mengubah budaya politik dan sosial yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan, serta pemusnahan struktur kolonial dan patriarkal yang masih memengaruhi cara masyarakat memahami dan menangani pengalaman korban.

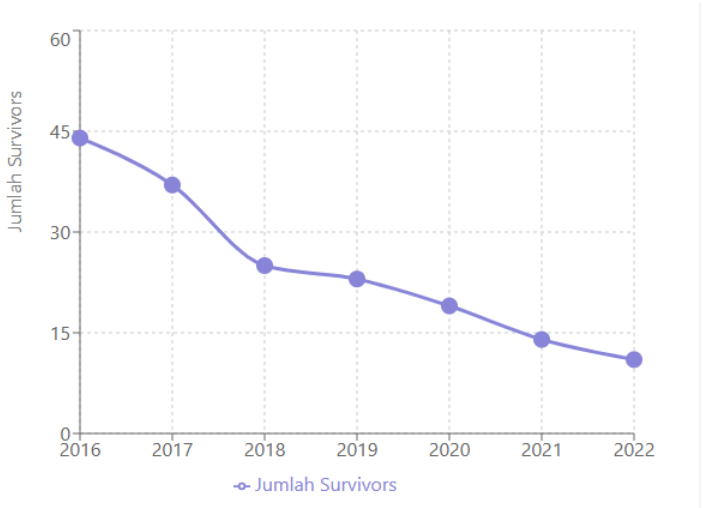

Gambar 4. 3 Grafik Penurunan Jumlah Penyintas vs Timeline Kebijakan Moon Jae-in

Interpretasi: Penurunan dramatis penyintas dari 37 (2017) menjadi 11 (2022) menunjukkan urgensi kebijakan Moon Jae-in

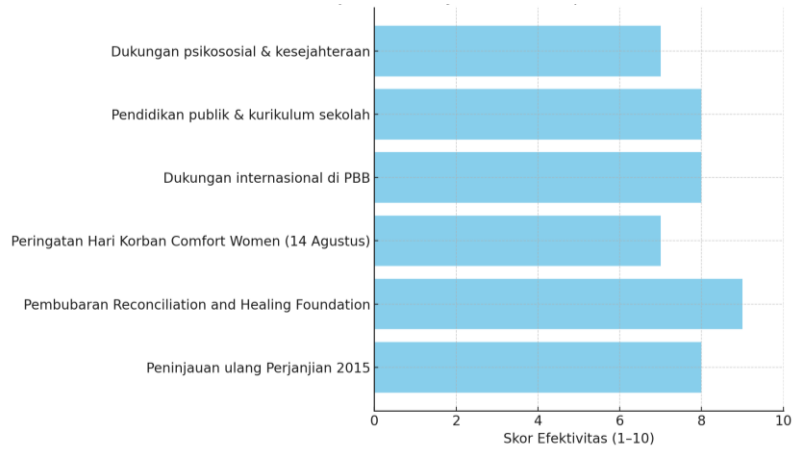

Gambar 4. 4 Grafik Efektivitas Kebijakan Moon Jae-in

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan analisis data sekunder sebagaimana tertuang dalam studi pustaka skripsi ini.

Pada grafik di atas menunjukkan tingkat seberapa efektif berbagai kebijakan Presiden Moon Jae-in dalam memenuhi hak-hak korban *Comfort Women* di Korea Selatan. Studi ini menemukan bahwa peninjauan ulang Perjanjian 2015 dan pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation* adalah yang paling efektif karena dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan kepedulian negara terhadap keinginan korban dan masyarakat sipil. Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran publik dan mempertahankan ingatan sejarah, kebijakan seperti dukungan pendidikan dan peringatan hari nasional dianggap penting, walau pelaksaannya masih terbatas secara jangkauan.

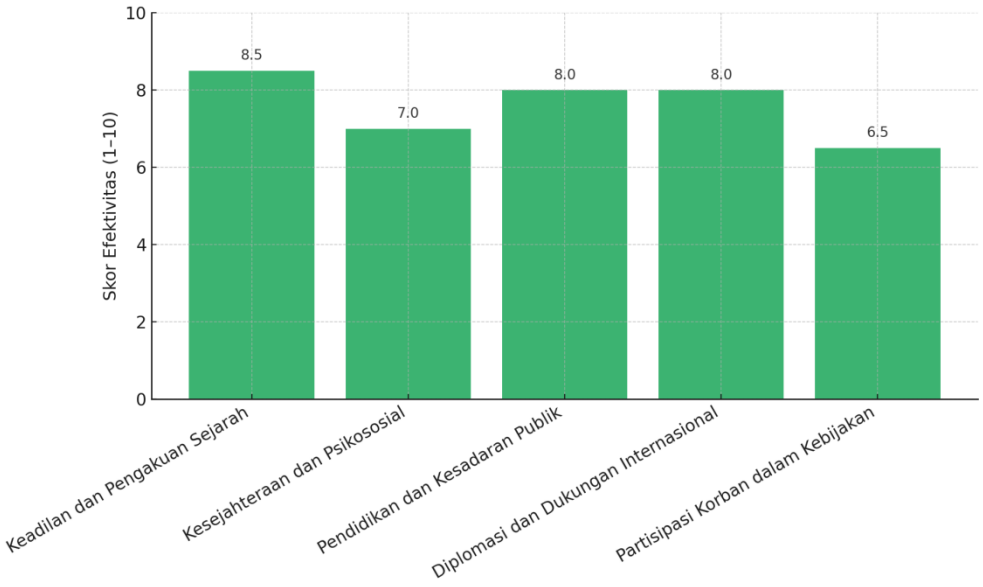

Gambar 4. 5 Grafik Evaluasi Keseluruhan Efektivitas Kebijakan Moon Jae-in Terkait Pemenuhan Hak Korban *Comfort Women* di Korea Selatan

Grafik di atas menggambarkan lima komponen utama kebijakan *Comfort Women* masa Moon Jae-in. Karena kebijakan penolakan perjanjian 2015, pembubaran yayasan lama, dan dukungan terhadap simbol perlawanan, aspek keadilan dan pengakuan sejarah mendapat skor tertinggi. Selain itu, pendidikan publik dan diplomasi dinilai efektif dalam menyuarakan masalah ini secara internasional dan domestik. Tapi keterlibatan korban masih menjadi masalah, yang menunjukkan bahwa perumusan kebijakan harus lebih inklusif dan partisipatif.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan *Comfort Women* pada masa kepemimpinan Moon Jae-in (2017-2022), dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Perubahan Pendekatan Kebijakan:

Pemerintahan Moon Jae-in menunjukkan pergeseran dari pendekatan diplomasi semata ke pendekatan berbasis hak asasi manusia yang lebih berpusat pada korban. Hal ini tercermin dalam pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation* serta peninjauan ulang *Japan-South Korea Agreement on Comfort Women 2015.*

2. Pemenuhan Hak Korban:

Kebijakan Moon Jae-in memperlihatkan respons positif terhadap tuntutan korban dan kelompok advokasi dengan menyediakan dukungan psikologis, layanan kesehatan, kompensasi finansial alternatif dari anggaran domestik, serta integrasi isu *Comfort Women* ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

3. Tantangan Diplomasi:

Meskipun kebijakan ini meningkatkan pengakuan dan keadilan bagi korban di dalam negeri, implementasinya menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Jepang yang menganggap perjanjian 2015 bersifat final dan tidak dapat diubah. Hal ini menunjukkan dilema antara upaya memenuhi keadilan historis dengan kebutuhan menjaga hubungan bilateral.

4. Kontribusi Kebijakan:

Kebijakan Comfort Women era Moon Jae-in berkontribusi pada penguatan perspektif gender dan HAM dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, serta memperlihatkan pentingnya peran negara dalam mengakui dan mengatasi trauma sejarah korban kekerasan berbasis gender.

5. Perlunya Keberlanjutan Advokasi:

Keberhasilan kebijakan Moon Jae-in belum sepenuhnya menjamin keadilan jangka panjang bagi korban, mengingat sebagian besar korban sudah lanjut usia. Keberlanjutan kebijakan yang berfokus pada pemulihan martabat dan pengakuan sejarah tetap diperlukan untuk mencegah pengulangan tragedi serupa dan memastikan pelestarian memori sejarah

DAFTAR PUSTAKA

Cho, M. (2020). Victim silencing, sexual violence culture, social healing: Inherited collective trauma of WWII Korean *Comfort Women*.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Fitria, Z. R. (2024). Diplomasi dan negosiasi Korea Selatan terhadap isu *Comfort Women* pada era Moon Jae-In. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Hankyoreh. (2018, August). *Comfort Women* issue: Government's pro-victim approach gains support.

Kim, J.-E. (2021). South Korea's victim-centered diplomacy and the *Comfort Women* issue. Asian Journal of Peacebuilding, 9(1), 23–45.

Korea Times. (2020, May). Corruption allegations may tarnish 30 years of '*Comfort Women*' movement.

Korean Council for Justice and Remembrance. (2019). Survey on *Comfort Women* survivors' response to Moon administration policies.

Lee, J.-S., & Kim, H.-A. (2021). Public opinion and policy formation in South Korea's approach to historical issues. Pacific Affairs, 94(2), 301–326.

Lind, J. M. (2008). Sorry states: Apologies in international politics. Cornell University Press.

Moser, C. O. N. (1993). Gender planning and development: Theory, practice and training. Routledge.

Park, K. S. (2022). The politics of memory and Japan-Korea *Comfort Women Agreement*. Contemporary Asian Studies, 48(1), 77–95.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (pp. 271–313). University of Illinois Press.

Teitel, R. (2000). Transitional justice. Oxford University Press.

The Chosun Ilbo. (2018, December). Moon administration's handling of *Comfort Women Agreement* draws criticism.

United Nations Human Rights Council. (2021). *Comfort Women* issue and human rights in international law.

UN Women. (2004). *Gender Mainstreaming* in practice: A toolkit. United Nations.

Wong, J. (2021). Historical memory and East Asian reconciliation: *Comfort Women* in South Korea–Japan relations. Asian Perspective, 45(1), 103–122.

Yonhap News Agency. (2018, November 21). S. Korea dissolves foundation on *Comfort Women* issue.

Anastasya, S. D. (2021). *Comfort Women*: Impacts on Japan's relations with South Korea and the Philippines. Malaysian Journal of International Relations.

Candelaria, A. P. (2023). Konstruksi predominant leader dalam kebijakan Moon Jae In terhadap Jepang dalam isu *Comfort Women* pada tahun 2017-2022. Indonesian Journal of Peace and Security Studies.

Soh, C. S. (2008). The *Comfort Women*: Sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan. Worlds of Desire.

Yoshimi, Y. (1995). *Comfort Women*: Sexual slavery in the Japanese military during World War II. Asia Perspectives.

Hyunmin, K. (2018). South Korea decides to dismantle '*Comfort Women*' *Reconciliation and Healing Foundation*. The Diplomat.

Kraeck, Y. X. (2021). An unforgettable ordeal: Chinese '*Comfort Women*' in World War II. Journal of Student Research, 2-15.

Rosenhaft, J.-H. L. (2021). Mnemonic solidarity: Global interventions. Springer Nature.